



Pemerintah Kota Denpasar
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



LAKIP Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
2010





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, Maret 2017

WALIKOTA DENPASAR



IDA BAGUS RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Kota Denpasar	3
B.1. Kondisi Geografis	3
B.2. Aparatur Pemerintah	5
B.3. Perekonomian	7
B.4. Bidang Keuangan Daerah.....	15
B.5. Sosial Budaya	16
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi... 28	
C.1. Kedudukan.....	28
C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok	29
C.3. Struktur Organisasi	31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	33
A. Rencana Strategis.....	33
B. Perjanjian Kinerja	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	85
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016.....	85
B. Akuntabilitas Keuangan	128
C. Analisa Efisiensi	134
BAB IV PENUTUP.....	137
LAMPIRAN	141





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2011 – 2015.....	4
Tabel 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Berlaku menurut Lapangan usaha (juta rupiah) tahun 2011-2015.....	7
Tabel 1.3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Dari Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha (juta rupiah) Tahun 2010 -2014.....	9
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2012-2015 (Persen)	13
Tabel 1.5	Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2010-2014	15
Tabel 1.6	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan Audit BPK-RI)	16
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Denpasar Tahun 2015	17
Tabel 1.8	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Denpasar Tahun 2013-2015	18
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015	18
Tabel 1.10	Indek Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2011-2015 beserta komponennya.....	20
Tabel 1.11	Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender Kota Denpasar Tahun 2011-2015	21
Tabel 1.12	Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2015	22
Tabel 1.13	Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2015	24
Tabel 1.14	Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar 2015.....	25





Tabel 1.15	Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015	26
Tabel 1.16	Jumlah Subak Yang Mendapatkan Pembinaan di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015	27
Tabel 1.17	Jumlah Desa Pakraman Yang Mendapatkan Pembinaan di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015	28
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016	41
Tabel 3.1	Capaian Kinerja	43
Tabel 3.2	Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan di Kota Denpasar.....	72
Tabel 3.3	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI).....	85
Tabel 3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2016.....	86
Tabel 3.5	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar	88
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja	43
Grafik 3.2	Capaian terhadap Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional di Kota Denpasar	47
Grafik 3.3	Capaian terhadap Memberdayakan lembaga keamanan tradisional di Kota Denpasar	50
Grafik 3.4	Capaian terhadap Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya di Kota Denpasar	51
Grafik 3.5	Capaian terhadap upaya Meningkatkan Perkembangan Ekonomi masyarakat kecil di Kota Denpasar	54
Grafik 3.6	Capaian terhadap upaya Meningkatkan Infrastruktur di Kota Denpasar	57
Grafik 3.7	Capaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma di Kota Denpasar..	60
Grafik 3.8	Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar	62
Grafik 3.9	Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar	64
Grafik 3.10	Capaian Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar	65
Grafik 3.11	Capaian sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar	68
Grafik 3.12	Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan di Kota Denpasar	70
Grafik 3.13	Capaian sasaran Meningkatkan Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya di Kota Denpasar	77
Grafik 3.14	Capaian Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali di Kota Denpasar	80
Grafik 3.15	Capaian Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat di Kota Denpasar	81
Grafik 3.16	Capaian Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama di Kota Denpasar	84





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	3
Gambar 1.2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar 2011-2015	10
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar 2011-2015 (Persen).....	12
Gambar 1.4	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015	19
Gambar 1.5	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2011-2015	23
Gambar 1.6	Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2011-2015	24
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar	32





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 21 Sasaran dan 62 Indikator Sasaran.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1. terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 14,29% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 57,14% kategori baik (mencapai target), 1 indikator





sasaran atau 14,29% kategori kurang (belum mencapai target) dan 1 indikator sasaran atau 14,29% nilainya belum keluar.

- Misi 2. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 11 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 27,27% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 18,18% kategori baik (mencapai target), dan 6 indikator sasaran atau 54,55% belum ada nilai.
- Misi 3. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 57,14 % kategori baik sekali (melampaui target), dan 3 indikator sasaran atau 42,86% belum ada nilai.
- Misi 4. terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 28 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 10 indikator sasaran atau 35,71 % kategori baik sekali (melampaui target), 11 indikator sasaran atau 39,29 % kategori baik (mencapai target), 1 indikator atau 3,57% kategori cukup (tidak mencapai target, dan 6 indikator sasaran atau 21,43% belum ada nilai.
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 11,11 % kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 55,56 % kategori baik (mencapai target), dan 1 indikator atau 11,11% kategori kurang (tidak mencapai target) dan 1 indikator sasaran belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





Pemerintah Kota Denpasar



sasaran terhadap 21 sasaran yang mencakup 62 indikator sasaran, diketahui bahwa 19 indikator sasaran atau 30,65% Baik Sekali (melampaui target), 22 indikator sasaran atau 35,48% Baik (mencapai target), dan 2 indikator sasaran atau 3,23 % kategori cukup (tidak mencapai target), 2 indikator sasaran atau 3,23% kategori kurang, dan 17 indikator sasaran atau 27,42% realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 131,56% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2016 Baik Sekali.



Pemerintah Kota Denpasar





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LAKIP Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2016 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016 yaitu tahun Pertama RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kota Denpasar telah dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan reviu atas sasaran strategis serta indikator kinerja dalam RPJMD sehingga dapat dijabarkan lebih lanjut ke SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing SKPD.
2. Melakukan penyempurnaan pada indikator kinerja utama, mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level Kota sampai individu pegawai.
3. Menyusun Rencana Aksi yang menghubungkan antara sasaran strategis yang akan dicapai dengan program kegiatan. Rencana Aksi merupakan panduan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja.
4. Penggunaan aplikasi e-kinerja dalam memonitor dan mengevaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
5. Perbaikan penerapan manajemen kinerja guna mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

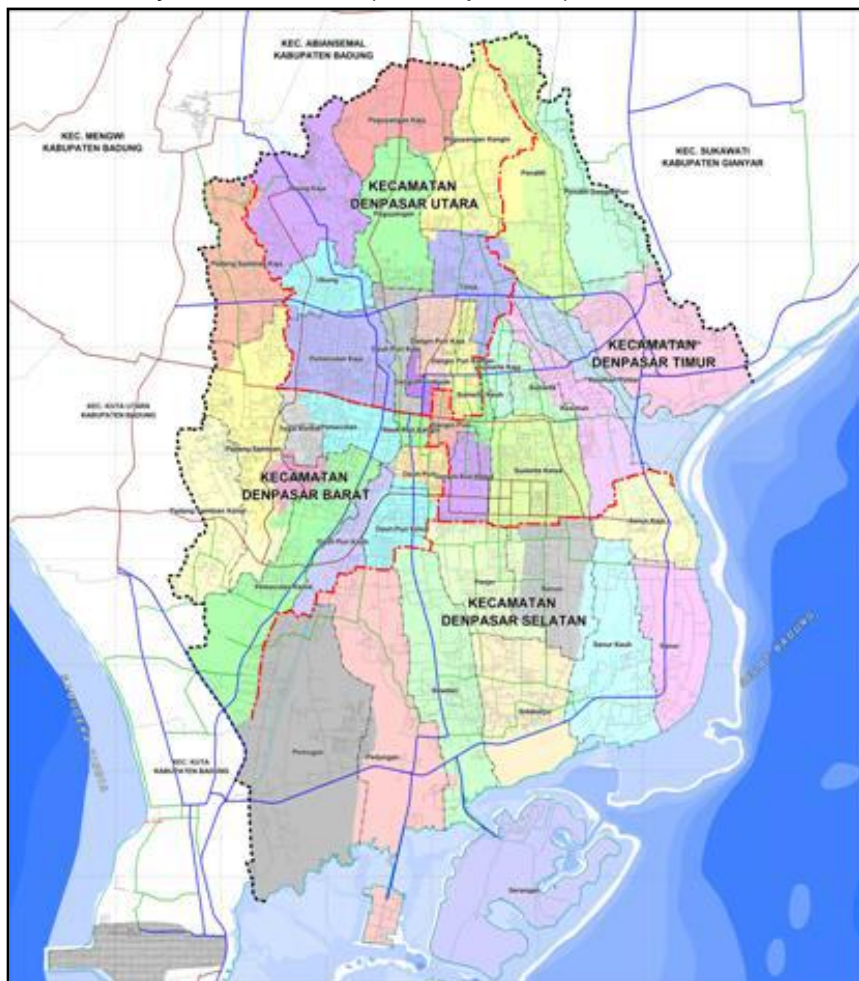




B. Kondisi Kota Denpasar

B.1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen).



Gambar 1.1

Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2011-2015) berkurang seluas 124 Ha atau rata-rata berkurang per tahun seluas 24,8 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2011-2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar)
Tahun 2011 - 2015

No.	Penggunaan Lahan	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Lahan Pertanian	3.113	3.035	3.022	3.014	2.989
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2.597	2.519	2.506	2.500	2.479
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	516	516	516	516	510
	a Tegalan	396	396	396	385	390
	b Perkebunan	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10
2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	9.665	9.743	9.756	9.762	9.789
	Jumlah	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar, 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





B.2. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 7158 orang, yang terdiri dari :



Walikota Denpasar memimpin Apel Kedisiplinan ASN Kota Denpasar

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

Golongan I	:	178 orang
Golongan II	:	1.456 orang
Golongan III	:	2.663 orang
Golongan IV	:	2.861 orang

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II	:	30 orang
Esselon III	:	178 orang
Esselon IV	:	625 orang
Esselon V	:	10 orang

c. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 6.135 orang, terdiri atas :

- 1) Fungsional guru sebanyak 3.201 orang
- 2) Fungsional Medis dan Paramedis sebanyak 622 orang
- 3) Fungsional tertentu sebanyak 153 orang
- 4) Staf dan Tata Usaha sebanyak 2.339 orang

d. Tingkat Pendidikan :

SD	:	132 orang
SMP	:	166 orang
SLTA	:	1.643 orang
D1	:	59 orang
D2	:	736 orang
D3	:	496 orang
S1/D4	:	3.498 orang
S2	:	427 orang
S3	:	1 orang





Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

- 1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 200 orang, yang terdiri dari :
 - Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 49 orang
 - Satyalancana Karya Satya XX Tahun 70 orang;
 - Satyalancana Karya Satya X Tahun 81 orang.



Penyerahan Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun, XX Tahun, dan X Tahun dirangkai dengan Hari Ulang Tahun Kota Denpasar

- 2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.225 Orang.
- 3) Pemberian penghargaan Purna Tugas 235 orang

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 243 orang
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 53 orang, terdiri dari :
 - Diklatpim II : 3 orang
 - Diklatpim III : 25 orang
 - Diklatpim IV : 25 orang
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 245 orang, dengan rincian :
 - Pendidikan dan pelatihan teknis : 240 orang
 - Pendidikan dan pelatihan fungsional : 5 orang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 10 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 2 orang, tingkat sedang 3 orang, pelanggaran disiplin tingkat berat 5 orang.

d. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar tidak melaksanakan pengadaan CPNS.

B.3. Perekonomian

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan secara fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 22.664.477,19 juta rupiah, tahun 2012 sebesar 25.819.231,08 juta rupiah, tahun 2013 sebesar 29.389.254,94, juta rupiah, tahun 2014 mencapai 34.208.828,94 juta rupiah dan tahun 2015 mencapai 38.463.726,26 juta rupiah. Selengkapnya perkembangan PDRB Kota Denpasar disajikan pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3

Tabel 1.2.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah) Tahun 2011 - 2015

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.813.024,49	1.986.001,38	2.170.980,17	2.475.899,44	2.748.028,13
B	Pertambangan dan Penggalian	16.944,90	20.329,32	22.890,01	25.071,28	25.330,98
C	Industri Pengolahan	1.679.170,21	1.858.595,96	2.058.868,34	2.342.479,72	2.595.381,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	88.974,23	88.057,45	84.997,11	109.385,78	145.849,77



No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6	7
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	73.272,93	75.911,03	80.390,37	87.636,88	101.116,08
F	Konstruksi	2.090.112,93	2.683.650,36	2.951.641,20	3.126.126,47	3555.518,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.199.996,41	2.396.997,79	2.645.105,46	3.047.571,07	3.512.823,53
H	Transportasi dan Pergudangan	713.972,03	795.101,12	902.921,23	1.052.803,67	1.171.372,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.404.345,69	6.519.877,87	7.870.764,75	9.908.704,35	10.924.363,27
J	Informasi dan Komunikasi	1.141.383,66	1.246.242,28	1.302.543,28	1.424.722,21	1.635.008,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.330.491,21	1.597.269,91	1.876.978,13	2.146.319,95	2.360.242,80
L	Real Estat	1.085.914,19	1.187.935,76	1.319.135,56	1.495.441,72	1.676.201,72
M. N	Jasa Perusahaan	432.540,35	470.742,50	524.618,33	596.164,15	4.141.638,79
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.383.593,68	1.422.309,80	1.427.889,91	1.617.884,07	1.785.016,57
P	Jasa Pendidikan	2.396.718,15	2.564.743,41	3.105.983,97	3.561.373,51	4.141.638,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	467.989,92	522.427,59	610.84535	699.700,84	823.650,39
R.S .T U	Jasa lainnya	346.032,21	383.037,53	432.701,78	491.543,83	572.252,84
	Produk Domestik Regional Bruto	22.664.477,19	25.819.231,08	29.389.254,94	34.208.828,94	38.463.726,26

* Angka sementara; ** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016

Tabel 1.3.
 Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Dari Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
 Lapangan Usaha (Juta rupiah) Tahun 2010 - 2014

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014*	2015**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.736.881,20	1.784.077,70	1.827.499,20	1.983.619,70	1.976.247,47
B	Pertambangan dan Penggalian	16.183,10	18.919,10	20.139,70	19.969,70	19.006,20
C	Industri Pengolahan	1.589.335,60	1.680.211,90	1.802.751,60	1.948.014,80	2.015.853,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	101.505,60	113.765,70	121.974,70	124.511,40	124.978,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	73.331,60	76.410,70	79.944,90	85.230,30	90.379,85
F	Konstruksi	1.973.646,90	2.378.320,60	2.498.338,90	2.526.388,30	2.718.743,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.039.290,80	2.181.524,20	2.358.611,50	2.515.109,70	2.756.326,10
H	Transportasi dan Pergudangan	700.412,50	745.033,60	789.100,70	856.361,70	908.224,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.113.084,90	5.573.797,30	5.989.052,10	6.318.390,20	6.564.846,46
J	Informasi dan Komunikasi	1.138.571,60	1.242.755,20	1.302.991,70	1.386.996,90	1.507.982,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.269.583,50	1.391.678,90	1.557.298,70	1.696.853,40	1.819.415,31
L	Real Estat	1.048.562,60	1.126.169,10	1.194.073,90	1.292.791,00	1.414.793,65
M. N	Jasa Perusahaan	427.052,50	439.983,10	476.363,10	509.545,90	547.390,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.362.071,00	1.389.418,50	1.376.123,40	1.516.580,50	1.616.264,44
P	Jasa Pendidikan	2.384.524,80	2.414.009,60	2.722.354,00	2.996.744,50	3.238.726,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	451.364,80	483.084,10	540.153,00	604.239,30	680.789,04
R.S .T. U	Jasa lainnya	338.003,30	358.014,50	369.608,10	396.127,70	433.279,34
Produk Domestik Regional Bruto		21.763.406,30	23.397.173,90	25.026.379,30	26.777.481,90	28.433.247,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

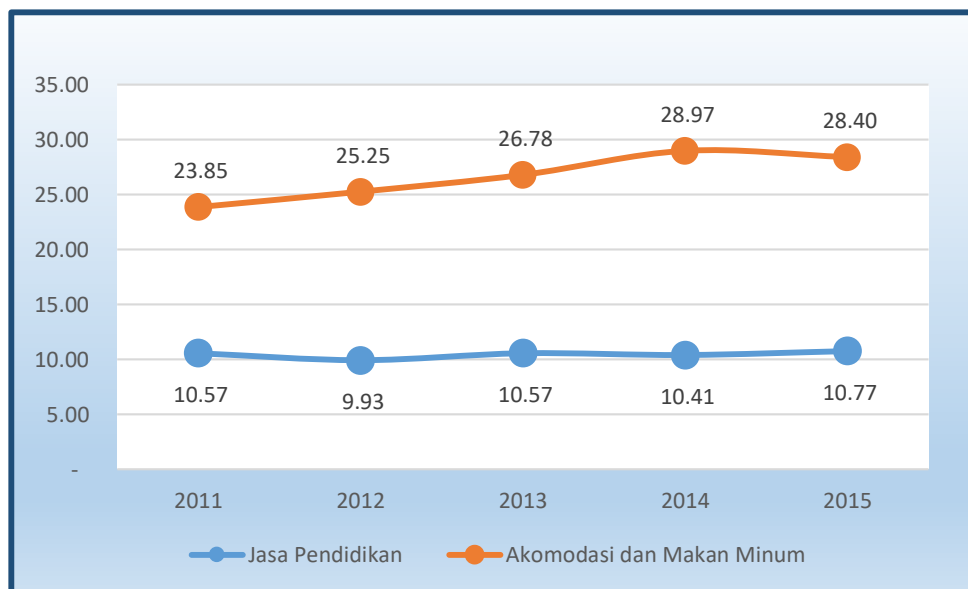
Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016



b. Struktur Perekonomian Daerah

Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah/wilayah adalah distribusi persentase dari nilai tambah bruto lapangan usaha. Struktur ekonomi ini salah satunya juga dapat digunakan untuk mengamati keunggulan atau potensi daerah/wilayah bersangkutan.

Dilihat dari share PDRB Kota Denpasar, pariwisata masih menjadi yang terbesar penyumbang pembentukan PDRB Kota Denpasar walaupun sedikit melambat perannya di tahun 2015 sebesar 0,56 persen dari 28,96 tahun 2014 menjadi 28,40 persen pada tahun 2015, sedangkan kategori penyumbang PDRB kedua yaitu jasa pendidikan sebesar 10,77 persen terbanding terbalik dengan kategori penyedia akomodasi dan makan minum. Kategori jasa pendidikan sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,36 persen.



Gambar 1.2.

Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar 2011-2015





Lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar eceran, dan pertanian juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Denpasar. Di tahun 2015 ketiga lapangan usaha ini memberikan share masing-masing sebesar 9,24 persen; 9,13 persen dan 7,14 persen.

Gambar 1.2 menunjukkan besarnya potensi jasa pendidikan di Kota Denpasar sebagai pusat tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Bali, sehingga Kota Denpasar menjadi tujuan pelajar dari berbagai daerah untuk datang dan menempuh pendidikan di Kota Denpasar. Kota Denpasar termasuk salah satu tujuan wisata, hal tersebut didukung dengan banyaknya jasa akomodasi yang menawarkan berbagai tujuan perjalanan wisata yang ada di Provinsi Bali.

c. Pertumbuhan Ekonomi

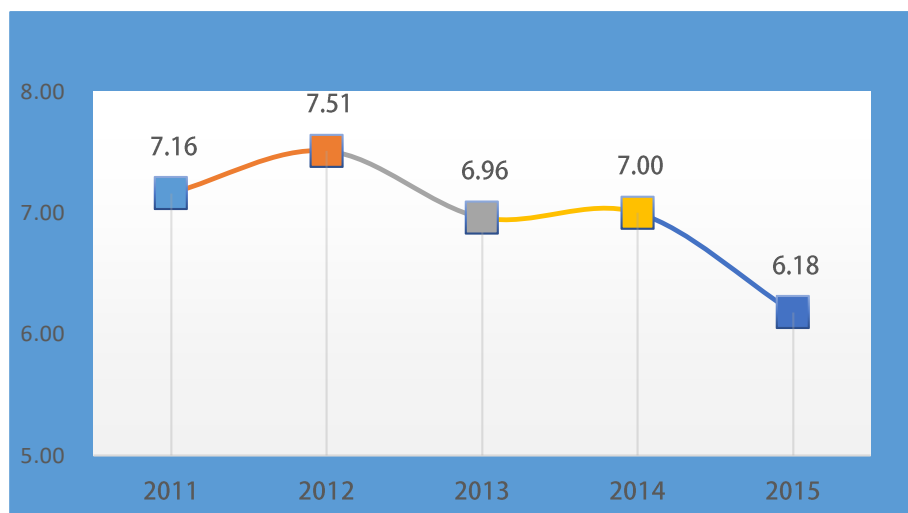
Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa disuatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2015 mencapai 6,18 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 4,79 persen. Selama tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar melambat. Pertumbuhan dari tahun 2011-2015, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berfluktuasi. Terlihat dari tahun 2011 sebesar 7,16 persen meningkat menjadi sebesar 7,51 persen pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi





6,98 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 dapat sedikit meningkat menjadi 7 persen. Sedangkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kontraksi dari sisi target rencana pembangunan dan penyerapan anggaran tidak memenuhi target sesuai rencana, hal tersebut menjadi salah satu dampak melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yaitu sebesar 6,18 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar,
2011-2015 (Persen)

Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2012-2015, lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 10,84 persen. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selain memiliki laju pertumbuhan yang tertinggi di tahun 2015 juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang kedua diduduki oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,43 persen dan diikuti oleh konstruksi sebesar 8,57 persen. Selanjutnya jasa pendidikan sebesar 8,04 persen. Sedangkan untuk penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata





pertumbuhan sebesar 6,47 persen sedangkan lapangan usaha pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,33 persen.

Dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Denpasar lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga mengalami kontraksi di tahun 2015. Kota Denpasar tidak memiliki lokasi galian C namun masih dapat ditemui hasil pertambangan dan penggalian lainnya. Laju pertumbuhan riil PDRB Kota Denpasar menurut lapangan usaha pada tahun 2012 s.d 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2012-2015 (Persen)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,72	2,43	8,54	-0,37	3,33
B	Pertambangan dan Penggalian	16,91	6,45	-0,84	-0,83	4,42
C	Industri Pengolahan	5,72	7,29	8,06	3,48	6,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,08	7,22	2,09	-0,51	5,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,20	4,63	6,61	6,04	5,37
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran	20,50	5,05	1,12	7,61	8,57
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,97	8,12	6,64	9,59	7,83
H	Transportasi dan Pergudangan	6,37	5,91	8,52	6,06	6,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	7,45	5,50	3,90	6,47
J	Informasi dan Komunikasi	9,15	4,85	6,45	8,72	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,62	11,90	8,96	7,22	9,43
L	Real Estat	7,40	6,03	8,27	9,44	7,78
M,N	Jasa Perusahaan	3,03	8,27	6,97	7,43	6,42



Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1		2	3	4	5	6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	-0,96	10,21	6,57	4,46
P	Jasa Pendidikan	1,24	12,77	10,08	8,07	8,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,03	11,81	11,86	12,67	10,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,92	3,24	7,18	9,38	6,43
Produk Domestik Regional Bruto		7,51	6,96	7,00	6,18	6,91

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016

Selama periode tahun 2012-2015, ternyata ada sembilan lapangan usaha yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang mencapai 6,91 persen. Kesembilan lapangan usaha itu adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,51 persen; Pertambangan dan Penggalian (4,42 persen); Industri Pengolahan (6,14 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (5,44 persen); Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,37 persen); Transprotasi dan Pergudangan (6,72 persen); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,47 persen); Jasa Perusahaan (6,42 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,46 persen) dan Jasa Lainnya (6,43 persen).

d. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum disuatu daerah pada waktu tertentu. Selama tiga tahun terakhir, tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tingkat inflasi Kota Denpasar mencapai 2,70 persen. Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 8,03 persen.

Tingkat inflasi pada tahun 2015 paling banyak disumbang oleh kelompok kesehatan serta perumahan, masing-masing dengan tingkat



inflasi 5,26 persen dan 5,09 persen. Kelompok pengeluaran yang juga menyumbang inflasi cukup besar adalah kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga, sandang serta kelompok pengeluaran perumahan masing-masing dengan tingkat inflasi 4,23 persen dan 3,61 persen. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.5.
Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2010-2014

No	Kelompok	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Inflasi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70
2.	Inflasi Menurut Kelompok:					
2.1	Bahan Makanan	3,49	6,06	10,36	11,23	3,31
2.2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,92	8,67	5,19	6,29	3,55
2.3	Perumahan	4,13	3,97	5,64	7,20	5,09
2.4	Sandang	6,23	0,92	-1,42	3,60	3,61
2.5	Kesehatan	2,41	2,13	1,49	9,99	5,26
2.6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	1,06	6,44	4,22	4,34	4,23
2.7	Transpor dan komunikasi	2,39	1,26	12,62	9,78	3,35

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2016

B.4. Bidang Keuangan Daerah

Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan





daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Belanja daerah Pemerintah Kota Denpasar pada tahun anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp 2.048.492.741.527,27 dengan komposisi 53,10% belanja tidak langsung dan 46,90% belanja langsung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6.
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan Audit BPK-RI)

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016			
		ANGGARAN BELANJA		REALISASI ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1.087.829.312.089,28	53,10	1.029.213.190.220,06	55,63
2	Belanja Langsung	960.663.429.437,99	46,90	820.870.580.647,75	44,37
	Jumlah	2.048.492.741.527,27	100,00	1.850.083.770.867,81	100,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

B.5. Sosial Budaya

a. Penduduk

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2015 mencapai 880.600 jiwa, dengan rincian





jumlah penduduk laki-laki 449.700 jiwa (51,05%) dan jumlah penduduk perempuan 430.900 jiwa (48,95%). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 6.891 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah sebesar 127,78km².

Penduduk Kota Denpasar tahun 2015 menurut umur didominasi oleh penduduk usia produktif (25-54 tahun) sebanyak 427.060 jiwa. Penduduk usia sekolah (usia 5-24 tahun) sebanyak 305.700 jiwa. Jumlah penduduk Kota Denpasar menurut usia yang berjumlah paling sedikit yaitu usia manula (55 tahun ke-atas) berjumlah 72.300 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Kota Denpasar berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kota Denpasar Tahun 2015

No	Kelompok Umur / Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 - 4	38.600	37.200	75.800
2	5 - 9	37.600	35.200	72.800
3	10 - 14	33.600	33.300	66.900
4	15 - 19	48.100	36.110	70.310
5	20 - 24	48.190	47.600	95.700
6	25 - 29	43.000	44.800	92.990
7	30 - 34	39.500	40.400	83.400
8	35 - 39	38.400	38.100	77.600
9	40 - 44	30.700	35.200	73.600
10	45 - 49	21.600	27.700	58.400
11	50 - 54	15.000	19.200	40.800
12	55 - 59	9.300	13.900	28.900
13	60 - 64	5.800	8.500	17.800
14	65 - 69	3.200	5.900	11.700
15	70 - 74	2.900	3.600	6.800
16	> 75	2.900	4.200	7.100
	JUMLAH	449.690	430.910	880.600

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016





b. Tenaga Kerja

Dilihat dari kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja Kota Denpasar sebanyak 668.230 jiwa yang terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 485.724 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja sebanyak 182.506 jiwa. Penduduk Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 468.515 jiwa dan pengangguran sebanyak 17.209 jiwa. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8.
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Denpasar
Tahun 2013-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1.	Penduduk Usia Kerja	638.738	653.326	668.230
2.	Angkatan Kerja	441.880	472.103	485.724
	- Bekerja	429.844	461.135	468.515
	- Pengangguran	12.036	10.968	17.209
3.	Bukan Angkatan Kerja	196.858	181.223	182.506
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69	72	72,69
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	3	2	3,54

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016

Penduduk Kota Denpasar sebagian besar bermata pencaharian pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel yaitu sejumlah 220.739 jiwa atau 47,11% dari Jumlah Penduduk yang bekerja di Kota Denpasar tahun 2015. Secara terperinci jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, diuraikan dalam tabel berikut.





Tabel 1.9.
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015

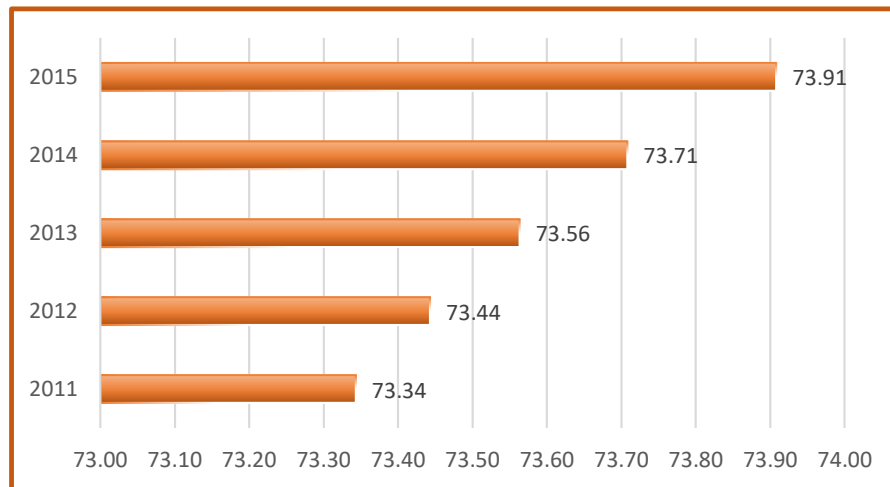
No	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	6.144	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0,00
3	Industri Pengolahan	48.863	10,43
4	Listrik, Gas dan Air	566	0,12
5	Bangunan	37.620	8,03
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	220.739	47,11
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	25.912	5,53
8	Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan Bangunan	30.745	6,56
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial, dan Perseorangan	97.926	20,90
10	Lainnya	0	0,00
	Jumlah	468.515	100,00

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016

c. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya.





Gambar 1.4
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016

Angka Harapan Hidup pada Tahun 2011 sebesar 73,34 tahun dan pada Tahun 2015 menjadi 73,91 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,56 tahun atau terjadi peningkatan sebesar 0,77%.

d. **Indek Pembangunan Manusia**

Pembangunan daerah di Kota Denpasar diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kota Denpasar memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indek Pembangunan Manusia sebagai berikut :



Tabel 1.10.
 Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar
 Tahun 2011-2015 beserta komponennya

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Komponen IPM						
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,34	73,44	73,56	73,71	73,91
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,40	12,60	12,79	13,32	13,46
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,44	10,59	10,82	10,90	10,96
4	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp .000)	17.675	17.944	18.227	18.532	18.605
	IPM	79,19	79,77	80,45	81,32	81,65

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016

Pada tahun 2011-2015 IPM Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. IPM Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah 82,24. Angka komponen penghitungan IPM selama tahun 2011-2015 juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh stakeholder Kota Denpasar. Kenaikan IPM hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata segenap komponen masyarakat Kota Denpasar agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi.

e. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga



yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender yang dilakukan perhitungannya oleh BPS Kota Denpasar sebesar 96,07% serta ada upaya dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan gender di Kota Denpasar.

Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender di Kota Denpasar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11.
Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender
Kota Denpasar Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Indek Pembangunan Gender	95.41	95.85	96,00	96.55	96.07
2	Indek Pemberdayaan Gender	55.74	56.28	59.66	58.25	58.50

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2016

f. Pendidikan

Bila dilihat dari Indikator Pendidikan, angka melek huruf penduduk Kota Denpasar tahun 2015 mencapai 97,96 persen yang berarti bahwa 97,96 persen penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar tahun 2015 sebesar 11,02 tahun. Angka partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 tahun sebesar 97,54 persen, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 tahun sebesar 97,54 persen dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun sebesar 85,94 persen. Secara rinci dapat diuraikan dalam :





Tabel 1.12.

Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2015

No	Uraian	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
1.	Angka Melek Huruf (persen)	97,95	98,01	97,96
	- Laki-Laki	98,94	99,34	99,31
	- Perempuan	94,83	96,61	96,56
2.	Rata-rata Lama Sekolah (persen)	10,98	10,96	11,02
3.	Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
	7 – 12 tahun	100,00	97,85	99,33
	13 – 15 tahun	95,83	99,06	97,54
	16 – 18 tahun	73,95	81,61	85,94

Sumber Diolah :BPS Kota Denpasar, 2016

g. Kemiskinan

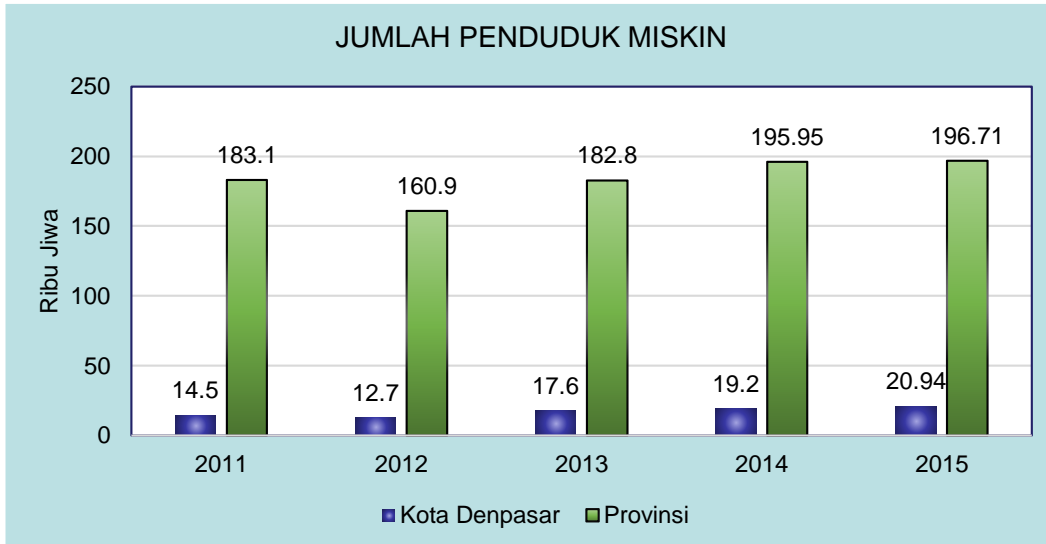
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar sejak tahun 2011 s/d 2015 mengalami fluktuasi, tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 14,5 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 12,7 ribu jiwa, sedangkan mulai tahun 2013 s/d 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,6 ribu jiwa, sampai tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 20,94 ribu jiwa. Selengkapnya disajikan pada Gambar 1.1.dan Gambar 1.2.Penyebabnya antara lain Jumlah pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di Kota Denpasar. Selain itu tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) yang sangat kecil ($P1=0,66$ & $P2=0,14$ pd th 2015) sehingga pergeseran garis kemiskinan dari Rp.426.513,- (th 2014) menjadi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016

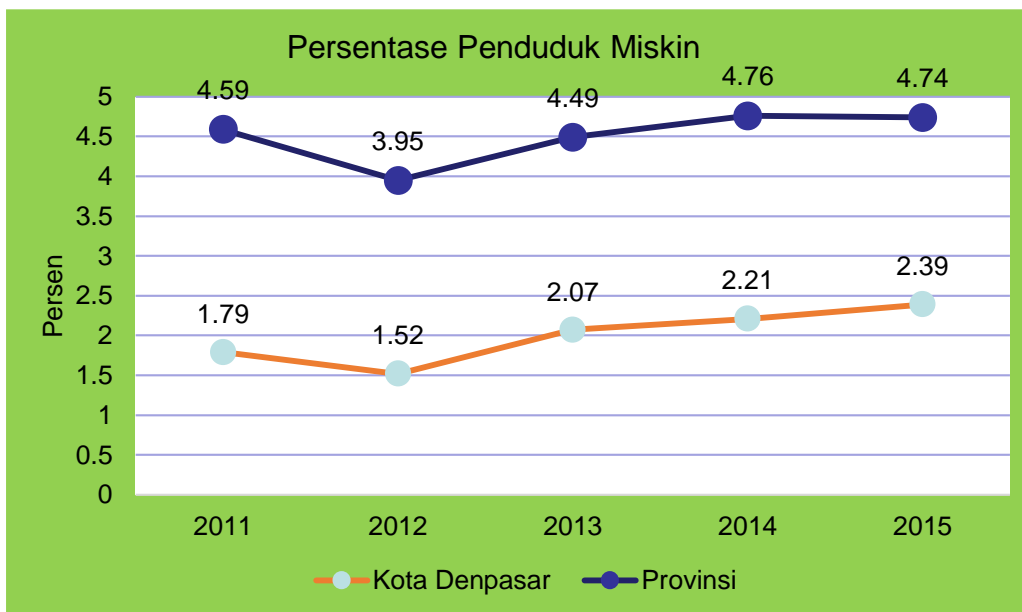




Rp.463.271,- (th 2015) berdampak pada besarnya pertambahan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar.



Gambar 1.5.
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2011-2015



Gambar 1.6.
Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2011-2015





h. Seni dan Budaya

Perkembangan organisasi kesenian di Kota Denpasar tahun 2010-2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 sebanyak 653 organisasi, jumlahnya mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sejumlah 767 organisasi, sedangkan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah organisasi kesenian di kota Denpasar mengalami penurunan. Pada tahun 2015 jumlahnya menjadi sebanyak 648 organisasi. Di bawah ini tersaji data jumlah organisasi kesenian di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 2015 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.13.
Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2015

Tahun	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
1	2	3	5	6	7
2015	165	227	150	106	648
2014	155	217	151	123	644
2013	181	238	155	193	767
2012	171	229	149	123	672
2011	154	218	154	127	653
2010	154	218	154	127	653

Sumber : BPS Kota Denpasar 2015

Jenis organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar sebanyak 30 jenis organisasi, paling banyak adalah gong kebyar yang mencapai 186 buah. Gong kebyar ini hampir terdapat pada setiap banjar, sedangkan beberapa kesenian langka saron, gambuh, seni keroncong hanya terdapat masing-masing 1 buah. Selain itu di Kota Denpasar juga diselenggarakan even sebanyak 9 even budaya setiap tahunnya. Selengkapnya disajikan pada berikut.



Tabel 1.14.
Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2015

No.	Organisasi Kesenian	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Barat	Denpasar Utara	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gong Gede	3	-	2	1	6
2.	Gong Kebyar	47	66	48	25	186
3.	Semar Pegulingan	3	11	-	-	14
4.	Angklung	24	30	20	17	91
5.	Gambang	2	4	3	-	9
6.	Selonding	-	5	1	1	7
7.	Saron	-	1	-	-	1
8.	Gong Suling	-	3	2	5	10
9.	Gambuh	1	-	-	-	1
10.	Barong	17	14	18	18	67
11.	Topeng	7	2	4	3	16
12.	Calon Arang	-	10	-	-	10
13.	Arja	-	1	-	-	1
14.	Sanghyang	-	2	-	-	2
15.	Wayang Wong	4	-	-	-	4
16.	Joged Bumbung	4	3	2	-	9
17.	Legong Dedari	-	4	-	-	4
18.	Wayang Kulit	9	11	7	3	30
19.	Gandrung	-	2	3	-	5
20.	Baris Upacara	2	-	-	3	5
21.	Janger	1	1	1	-	3
22.	MB. Keroncong	-	1	-	-	1
23.	Sastra daerah	-	-	-	4	4
24.	Drama Gong	-	-	-	-	0
25.	Tekok Jago	6	1	-	-	7
26.	Sanggar Seni Tari	30	40	30	20	120
27.	Gong Beri	-	-	-	-	0
28.	Gender Wayang	5	11	5	6	27
29.	Gdr. Pelegongan	-	4	4	-	8
	Jumlah	165	227	150	106	648

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016



Tabel 1.15.
Jumlah Event yang diselenggarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015

No.	Jenis Event	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pesta Kesenian Bali (PKB)	1	1	1	1	1
2.	Pengembangan Kreativitas Seni Budaya HUT Kota Denpasar	1	1	1	1	1
3.	Misi Kesenian Keluar Daerah	2	2	2	2	2
4.	Pementasan & Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Nilai Budaya	1	1	1	1	1
5.	Maha Bandana Prasada	1	1	1	1	1
6.	Festival Raja Raja Nusantara	1	1	1	1	1
7.	Pesona Pulau Serangan	1	1	1	1	1
8.	Sanur Festival	-	-	1	1	1
9.	Denpasar Festival	1	1	1	1	1
10.	Melepas matahari	1	1	1	1	1
	Jumlah	10	10	11	11	11

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016

Jumlah Organisasi Pemakai Air (Subak) yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2015 sebanyak 42 subak. Peranan subak sebagai salah satu kearifan lokal yang dapat menjaga sistem irigasi perairan dan menjadi inti dari usaha pemberdayaan alam dan masyarakat juga pengembangannya dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan pembinaannya dari tahun ke tahun dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 1.16.
Jumlah Subak Yang Mendapatkan Pembinaan di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kec. Denpasar Utara	-	1	1	2	1
2.	Kec. Denpasar Timur	-	1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	-	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat	1	1	1	1	1
	Jumlah	1	4	4	5	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016





Jumlah Desa Pekraman di Kota Denpasar tahun 2016 sebanyak 35 Desa Pekraman, dengan sebaran di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 10 Desa Pakraman, di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 12 Desa Pekraman di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 11 Desa Pekraman, di Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 2 Desa Pakraman. Peranan desa pakraman dalam melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat istiadat serta memelihara stabilitas pemerintahan daerah memegang peranan penting. Berbagai pembinaan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga adat seperti desa pekraman terus dilakukan. Selengkapnya jumlah Desa Pakraman yang mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.17.
Jumlah Desa Pakraman Yang Mendapatkan Pembinaan
di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015

No.	Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kec. Denpasar Utara	1	1	1	1	1
2.	Kec. Denpasar Timur		1	1	1	1
3.	Kec. Denpasar Selatan	1	1	1	1	1
4.	Kec. Denpasar Barat		1	1	1	1
	Jumlah	2	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

C.1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam





pelaksanaannya di Kota Denpasar dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Denpasar dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Kota Denpasar sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk





menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 9 (sembilan) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, rincian urusan tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Denpasar, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1). Pendidikan ;
- 2). Kesehatan ;
- 3). Lingkungan Hidup ;
- 4). Pekerjaan Umum ;
- 5). Penataan Ruang ;
- 6). Perencanaan Pembangunan ;
- 7). Perumahan ;
- 8). Kepemudaan dan Olah Raga ;
- 9). Penanaman Modal ;
- 10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- 11). Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- 12). Ketenagakerjaan ;
- 13). Ketahanan Pangan ;
- 14). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- 16). Perhubungan ;
- 17). Komunikasi dan Informatika ;
- 18). Pertanahan ;
- 19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20). Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
- 21). Pemberdayaan Masyarakat ;
- 22). Sosial ;
- 23). Kebudayaan ;
- 24). Statistik ;
- 25). Kearsipan ; dan
- 26). Perpustakaan





sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

- 1). Kelautan dan Perikanan ;
- 2). Pertanian ;
- 3). Kehutanan ;
- 4). Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- 5). Pariwisata ;
- 6). Industri ;
- 7). Perdagangan ; dan
- 8). Ketransmigrasian ;
- 9). Pasedahan Agung ;

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

C.3. Struktur Organisasi

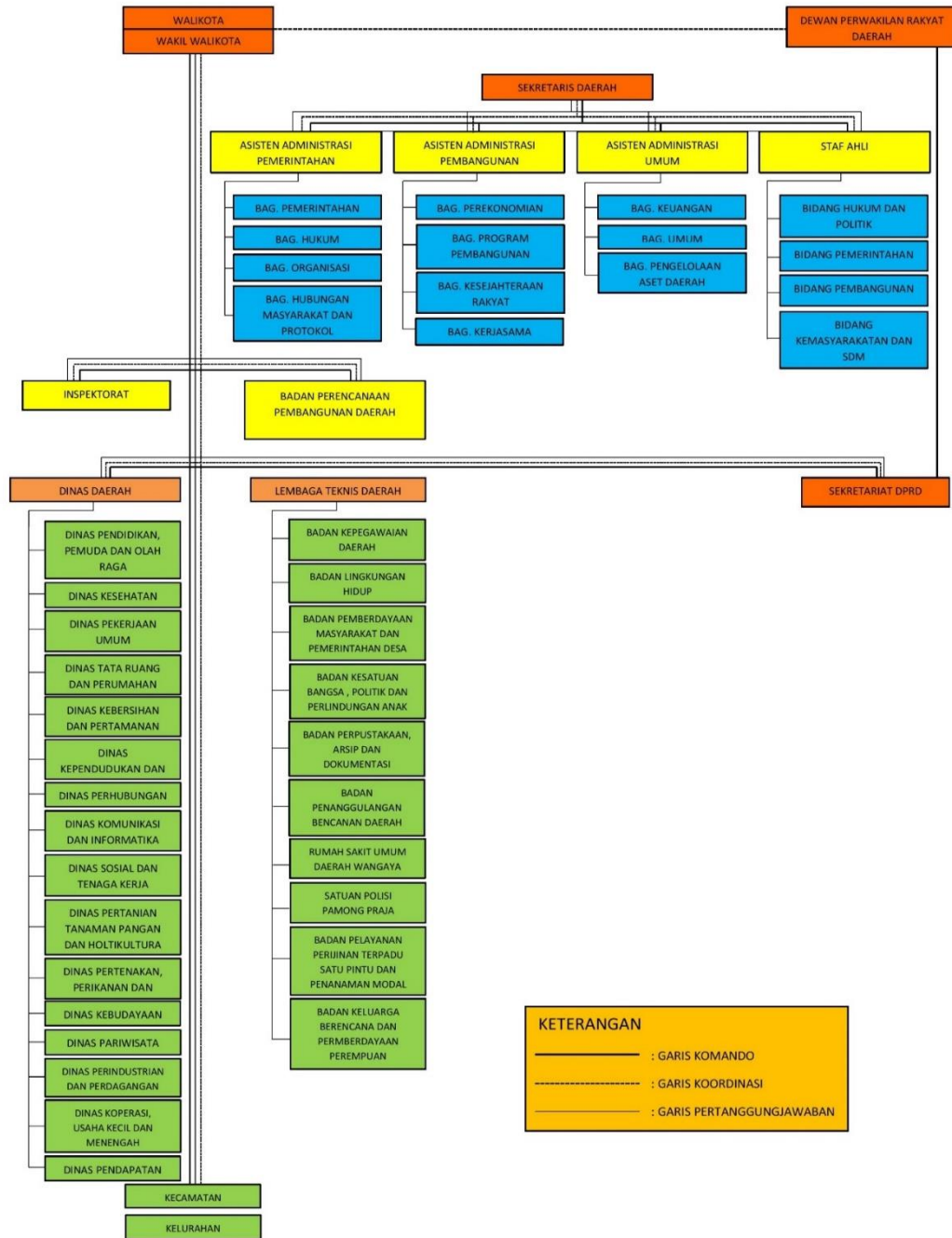
Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar berikut :





Gambar 1.7
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. RPJMD berupaya menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di daerah melalui strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan





masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016- 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi *Tri Hita Karana*”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.





2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan 1:

Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali





Sasaran :

- 1) Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ;

Indikator Kinerja :

- Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan (%).
- Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karena (Indek).
- Persentase LPD Sehat (%).

- 2) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Kerukunan Beragama.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Konflik Sosial (Kejadian).
- Jumlah Konflik Agama (Kejadian).

- 3) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya

Indikator Kinerja:

- Jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah (Sekaa).
- Jumlah Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya (Sanggar).
- Jumlah Sekaa Teruna yang mengikuti festival ogoh-ogoh (Sekaa Teruna).

b. Tujuan 2 :

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Sasaran :

- 1) Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran

Indikator Kinerja:

- Persentase penduduk miskin (%).
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%).





2) Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Indikator Kinerja:

- Persentase usaha mikro/Kecil yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Menengah (%).
- Persentase Usaha Menengah yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Besar (%).
- Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat (%).
- Persentase koperasi yang jumlah anggotanya meningkat (%).
- Persentase koperasi yang modalnya bertambah (%).

3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja:

- Indek Pembangunan Gender/IPG (Indek).
- Indek Pemberdayaan Gender/IDG (Indek).
- Persentase Kasus Perlindungan Anak yang terselesaikan (%).
- Persentase penurunan jumlah kejadian kasus kekerasan pada anak (%).

4) Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja:

- Persentase penurunan luasan permukiman kumuh (%).

5) Meningkatnya kualitas Infrastruktur

Indikator Kinerja :

- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%).
- Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%)
- Persentase Titik Genangan (%)
- Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)





- Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)

c. Tujuan 3 :

Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*)

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma

Indikator Kinerja:

- Indek Kepuasan Layanan Masyarakat (Indek)
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

Indikator Kinerja:

- Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).
 - Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /AKIP (Nilai).
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah /LPPD (Nilai).
 - Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai).
- 3) Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.

Indikator Kinerja:

- Indek Kepuasan Masyarakat.
- 4) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan





Indikator Kinerja:

- Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda (Persen).

d. Tujuan 4:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan

Sasaran:

1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja:

- Indek Pembangunan Manusia (Indek)

2) Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Indikator Kinerja:

- Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%).
- Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%).

3) Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan

Indikator Kinerja:

- Produktivitas padi (Kw/Ha)
- Produksi Perikanan (Ton)
- Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Th)
- Produksi Daging (Ton)
- Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kpt/Th)

4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan

Indikator Kinerja:

- Angka Harapan Hidup (Tahun)
- Angka Kematian Bayi (orang per 1000 Kelahiran hidup)
- Angka Kematian Ibu melahirkan (orang per 100.000 kelahiran hidup)
- Angka Kesakitan DBD (orang per 100.000 penduduk)





5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja:

- Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf
- Rata-rata Angka Partisipasi Kasar SD, SMP sederajat
- Rata-rata Angka Partisipasi Murni SD, SMP sederajat
- Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Usia SD, SMP sederajat
- Rata-rata Angka Kelulusan Siswa SD, SMP Sederajat
- Rata-rata nilai UN SD, SMP sederajat.

6) Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Indikator Kinerja:

- Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
- Lama Tinggal Wisatawan (hari)

e. Tujuan 5:

Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa

Sasaran:

1) Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.

Indikator:

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%)
- Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Taman (Indek).

2) Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat

Indikator:

- Persentase Sampah tereduksi (%).





- Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi standar baku mutu (%).
- Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu (%).

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota No. 18A.Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
1	Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1)	Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan
			2)	Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana
			3)	Persentase LPD Sehat





No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2	3	4		
		b	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	1)	Jumlah Konflik Sosial
		c	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1)	Jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah
				2)	Jumlah Sanggar tari yang mengikuti pentas budaya
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta	a.	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	1)	Persentase penduduk miskin
				2)	Tingkat Pengangguran Terbuka



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
1	pemerataan pembangunan infrastruktur	b. Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	1)	Persentase peningkatan penerbitan ijin usaha kecil
			2)	Persentase Koperasi yang modalnya bertambah
		c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	1)	Indek Pembangunan Gender (IPG)
			2)	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
		d. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1)	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh
		e. Meningkatkan Infrastruktur	1)	Persentase Titik Genangan
			2)	Persentase Rumah Tangga terlayani ipal skala kawasan dan skala kota
			3)	Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Air Bersih



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma</p> <p>b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</p> <p>c. Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.</p>	<p>1)</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p> <p>1)</p>	<p>Indek Kepuasan Layanan Masyarakat</p> <p>Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</p> <p>Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>Kepatuhan Standar Pelayanan Publik</p> <p>Indek Kepuasan Masyarakat</p>





No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
		d. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1)	Persentase Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1)	Indek Pembangunan Manusia
		b. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	1)	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB
			2)	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB
		c. Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	1)	Produktivitas padi
			2)	Produk olahan hasil perikanan
			3)	Konsumsi Ikan
			4)	Produk olahan hasil peternakan
5)	Konsumsi Protein Hewani			
d. Meningkatkan aksesibilitas dan	1)	Angka Harapan Hidup		



No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
		kualitas Kesehatan	2)	Angka Kematian Bayi
			3)	Angka kematian ibu melahirkan
			4)	Angka Kesakitan DBD
		e Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1)	Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf
			2)	Angka Partisipasi Kasar SD/MI
			3)	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs
			4)	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
			5)	Angka Partisipasi Murni SD/MI
			6)	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs
			7)	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA





No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
			8) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	
			9) Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	
			10) Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	
			11) Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	
			12) Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	
			13) Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	
		f	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	1) Jumlah Kunjungan Wisatawan
				2) Lama Tinggal Wisatawan
				3) Meningkatkan "Spend of Money"
		5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu	a.
			1) Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	
			2) Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Taman	





No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	2	3	4	
	keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	b. Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	1)	Persentase Sampah tereduksi
			2)	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu
			3)	Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu
			4)	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Mandiri
			5)	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional
			6)	Adipura Kirana
		c. Meningkatkan Kerukunan Beragama	1)	Indeks Kerukunan Umat Beragama

B. Perjanjian Kinerja





Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2015-2021, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 693.568.527.805,99 (72,19 persen dari total Belanja Langsung pada APBD Kota Denpasar TA 2016).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2016

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	41.872.099.225,00
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	213.735.016.589,00





No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)	81.643.594.802,00
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare Society</i>) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	275.303.146.779,99
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	81.014.760.410,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan	%	100
Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karena	Indek	-
Persentase LPD Sehat	%	100

Sasaran Strategis 2 Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	9

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah	Sekaa	100
Jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas budaya	Sanggar	44
Jumlah Sekaa Teruna yang mengikuti festival ogoh ogoh	Sekaa Teruna	360

Sasaran Strategis 4 Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase penduduk miskin	%	2,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase peningkatan penerbitan ijin usaha Kecil	%	5,00
Jumlah Koperasi yang sehat	Unit	150

Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	97
Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	59

Sasaran Strategis 7 Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	%	-

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya kualitas Infrastruktur		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Berkurangnya Titik Genangan	Lokasi	6
Persentase Rumah Tangga terlayani ipal skala kawasan dan skala kota	%	7,09
Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Layanan Air Bersih	%	48,96
Menurunnya Persentase jumlah kecelakaan lalu lintas	%	10

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Indek Kepuasan Layanan Masyarakat	Indek	80,00

Sasaran Strategis 10 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Katagori	WTP
Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	70,01
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	nilai	4,4025
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	81,00

Sasaran Strategis 11 Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Jumlah aplikasi pemerintah yang terintegrasi dalam mewujudkan pusat data	Aplikasi	5

Sasaran Strategis 12 Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (<i>Law Enforcement</i>) Dalam Tata Kelola Pemerintahan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda	Pelanggaran	3,265

Sasaran Strategis 13 Meningkatkannya Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Indek Pembangunan Manusia	Indek	83,01

Sasaran Strategis 14 Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	11,77
Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	13,17

Sasaran Strategis 15 Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016

Produktivitas padi	Kw/Ha	66,55
Produk olahan hasil perikanan	ton	1.422,20
Konsumsi Ikan	(Kg/Kpt/Th)	33,98
Produk olahan hasil peternakan	ton	198,86
Konsumsi Protein Hewani	(Kg/Kpt/Th)	16,77

Sasaran Strategis 16 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Angka Harapan hidup	Tahun	74,05
Angka Kematian Bayi	orang /1.000 KH	15
Angka kematian ibu melahirkan	orang /100.000 KH	100
Angka Kesakitan DBD	orang /100.000 penduduk	215

Sasaran Strategis 17 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	95,12
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105,00
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	105,00
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	105,00
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,82
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,83
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,01
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	103,13
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	110,22
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	%	70,20
Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	%	100,00
Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	%	100,00
Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100,00

Sasaran Strategis 18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016

Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	522.679
Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3,25
Meningkatkan "Spend of Money"	Rp.	-

Sasaran Strategis 19 Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	30,00
Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Taman	Indeks	-

Sasaran Strategis 20 Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Meningkatnya jumlah bank sampah	%	10
Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100,00
Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu	%	100,00
Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah	2
Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah	5
Penghargaan Adipura Kirana	Trophy	1

Sasaran Strategis 21 Meningkatkan Kerukunan Beragama		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2016
Jumlah Konflik agama	Kejadian	0

- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 sebesar Rp 2.048.492.741.527,27

KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.01.	PENDIDIKAN		73.613.439.044,00
1.01.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		73.613.439.044,00
1.01.1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.614.413.588,00
1.01.1.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.186.447.779,00
1.01.1.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		39.915.500,00
1.01.1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini		844.505.580,00
1.01.1.01.01.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		42.469.110.977,00
1.01.1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal		962.398.366,00
1.01.1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.892.432.890,00
1.01.1.01.01.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		8.489.671.604,00
1.01.1.01.01.23.	Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar		2.913.590.750,00
1.02.	KESEHATAN		144.147.013.697,19
1.02.1.02.01.	DINAS KESEHATAN		47.482.398.933,44
1.02.1.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.116.794.828,00
1.02.1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		5.481.667.221,00
1.02.1.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		118.256.100,00
1.02.1.02.01.15.	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		2.150.025.327,00
1.02.1.02.01.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		5.878.547.415,00
1.02.1.02.01.17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan		27.383.350,00
1.02.1.02.01.18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		80.884.500,00
1.02.1.02.01.19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		2.977.038.685,00
1.02.1.02.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		223.525.050,00

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.02.1.02.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					404.202.350,00		
1.02.1.02.01.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					16.505.706.543,00		
1.02.1.02.01.23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					946.984.109,00		
1.02.1.02.01.24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					3.200.000,00		
1.02.1.02.01.25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya					26.129.700,00		
1.02.1.02.01.28.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					4.995.204.849,44		
1.02.1.02.01.29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					78.966.100,00		
1.02.1.02.01.30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					387.037.256,00		
1.02.1.02.01.31.	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan					249.275.200,00		
1.02.1.02.01.32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					831.570.350,00		
1.02.1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA					95.187.981.663,75		
1.02.1.02.02.33.	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit					95.187.981.663,75		
1.02.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					201.459.700,00		
1.02.1.20.09.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					125.325.000,00		
1.02.1.20.09.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					76.134.700,00		
1.02.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					471.576.500,00		
1.02.1.20.10.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					150.671.000,00		
1.02.1.20.10.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					320.905.500,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.02.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					209.001.500,00		
1.02.1.20.11.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					25.350.000,00		
1.02.1.20.11.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					183.651.500,00		
1.02.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					172.256.500,00		
1.02.1.20.12.16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					50.796.700,00		
1.02.1.20.12.22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					121.459.800,00		
1.02.1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					422.338.900,00		
1.02.1.22.01.20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					422.338.900,00		
1.03.	PEKERJAAN UMUM					145.417.408.692,00		
1.03.1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM					137.062.443.802,00		
1.03.1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					8.024.122.040,00		
1.03.1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					4.105.912.690,00		
1.03.1.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					130.538.100,00		
1.03.1.03.01.15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					73.031.335.240,00		
1.03.1.03.01.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					11.780.301.700,00		
1.03.1.03.01.18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					5.526.429.400,00		
1.03.1.03.01.22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan					407.704.000,00		
1.03.1.03.01.24.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya					3.435.020.500,00		
1.03.1.03.01.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					6.524.274.842,00		
1.03.1.03.01.28.	Program Pengendalian Banjir					2.046.513.000,00		



KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.03.1.03.01.33.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		22.050.292.290,00
1.03.1.03.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		6.394.314.990,00
1.03.1.03.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.317.447.890,00
1.03.1.03.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		975.837.300,00
1.03.1.03.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		101.029.800,00
1.03.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT		425.779.000,00
1.03.1.20.09.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		199.759.000,00
1.03.1.20.09.33.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		226.020.000,00
1.03.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		79.307.500,00
1.03.1.20.10.33.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		79.307.500,00
1.03.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		1.113.008.400,00
1.03.1.20.11.16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		322.352.400,00
1.03.1.20.11.33.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		790.656.000,00
1.03.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA		342.555.000,00
1.03.1.20.12.33.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman		342.555.000,00
1.04.	PERUMAHAN		11.050.993.500,00
1.04.1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM		2.892.165.000,00



KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.04.1.03.01.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan					2.892.165.000,00		
1.04.1.03.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					7.209.831.800,00		
1.04.1.03.02.17.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan					315.294.500,00		
1.04.1.03.02.19.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran					3.176.873.500,00		
1.04.1.03.02.21.	Program Tanggap Darurat Kebencanaan					410.474.500,00		
1.04.1.03.02.22.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana					3.307.189.300,00		
1.04.1.05.01.	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN					903.274.700,00		
1.04.1.05.01.15.	Program Pengembangan Perumahan					903.274.700,00		
1.04.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					45.722.000,00		
1.04.1.20.09.16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan					45.722.000,00		
1.05.	PENATAAN RUANG					37.785.254.485,00		
1.05.1.05.01.	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN					37.785.254.485,00		
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.987.389.335,00		
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.244.906.100,00		
1.05.1.05.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					123.455.900,00		
1.05.1.05.01.16.	Program Pemanfaatan Ruang					31.852.241.550,00		
1.05.1.05.01.17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					2.577.261.600,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					10.497.193.609,00		
1.06.1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					10.124.458.659,00		
1.06.1.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.707.320.828,00		
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.209.875.208,00		
1.06.1.06.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					77.334.600,00		
1.06.1.06.01.15.	Program Pengembangan Data/Informasi					650.498.440,00		
1.06.1.06.01.16.	Program Kerjasama Pembangunan					1.252.116.887,00		
1.06.1.06.01.18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					764.121.669,00		
1.06.1.06.01.19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					377.936.494,00		
1.06.1.06.01.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					1.209.751.962,00		
1.06.1.06.01.22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					372.600.450,00		
1.06.1.06.01.23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya					781.172.803,00		
1.06.1.06.01.24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					721.729.318,00		
1.06.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					205.226.150,00		
1.06.1.20.03.16.	Program Kerjasama Pembangunan					89.674.000,00		
1.06.1.20.03.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					115.552.150,00		
1.06.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					33.461.300,00		
1.06.1.20.09.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					33.461.300,00		
1.06.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					58.265.000,00		
1.06.1.20.10.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					58.265.000,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.06.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					48.187.500,00		
1.06.1.20.11.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					48.187.500,00		
1.06.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					27.595.000,00		
1.06.1.20.12.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					27.595.000,00		
1.07.	PERHUBUNGAN					31.776.297.379,00		
1.07.1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN					31.776.297.379,00		
1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					15.850.685.456,00		
1.07.1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.645.621.400,00		
1.07.1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					98.090.900,00		
1.07.1.07.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					4.228.320.250,00		
1.07.1.07.01.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					4.417.098.833,00		
1.07.1.07.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					3.022.262.700,00		
1.07.1.07.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					1.276.858.600,00		
1.07.1.07.01.20.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					959.876.040,00		
1.07.1.07.01.21.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor					277.483.200,00		
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP					103.360.327.271,00		
1.08.1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP					4.468.467.754,00		
1.08.1.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					759.427.700,00		
1.08.1.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					514.335.400,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.08.1.08.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					49.325.000,00		
1.08.1.08.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					1.313.930.504,00		
1.08.1.08.01.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					611.806.900,00		
1.08.1.08.01.18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam					297.419.650,00		
1.08.1.08.01.19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					255.753.900,00		
1.08.1.08.01.20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi					565.199.700,00		
1.08.1.08.01.23.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut					101.269.000,00		
1.08.1.08.02.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN					98.687.959.517,00		
1.08.1.08.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					33.296.692.262,00		
1.08.1.08.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.131.459.000,00		
1.08.1.08.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					2.600.000,00		
1.08.1.08.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					38.572.045.060,00		
1.08.1.08.02.17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					313.759.500,00		
1.08.1.08.02.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					1.410.492.000,00		
1.08.1.08.02.25.	Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan					23.960.911.695,00		
1.08.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					154.747.000,00		
1.08.1.20.09.25.	Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan					154.747.000,00		
1.08.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					20.803.000,00		
1.08.1.20.10.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					20.803.000,00		



KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.08.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		28.350.000,00
1.08.1.20.11.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		28.350.000,00
1.09.	PERTANAHAN		421.243.600,00
1.09.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH		421.243.600,00
1.09.1.20.03.16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		352.818.500,00
1.09.1.20.03.17.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		68.425.100,00
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5.616.707.805,00
1.10.1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.679.547.655,00
1.10.1.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.197.841.405,00
1.10.1.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		956.430.630,00
1.10.1.10.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		32.310.900,00
1.10.1.10.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		1.492.964.720,00
1.10.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT		185.553.300,00
1.10.1.20.09.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		185.553.300,00
1.10.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		104.315.000,00
1.10.1.20.10.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		104.315.000,00
1.10.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		420.235.000,00
1.10.1.20.11.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		420.235.000,00





KODE	URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.10.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	227.056.850,00
1.10.1.20.12.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	227.056.850,00
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.172.231.660,00
1.11.1.12.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.113.827.160,00
1.11.1.12.01.15.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41.300.000,00
1.11.1.12.01.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	979.327.060,00
1.11.1.12.01.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	15.325.000,00
1.11.1.12.01.18.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	77.875.100,00
1.11.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	45.210.000,00
1.11.1.20.10.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	45.210.000,00
1.11.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	7.300.000,00
1.11.1.20.11.17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	7.300.000,00
1.11.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	5.894.500,00
1.11.1.20.12.16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5.894.500,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	4.625.483.991,00
1.12.1.12.01.	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.886.745.991,00
1.12.1.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.379.779.639,00



KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.12.1.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					585.027.152,00		
1.12.1.12.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					37.151.200,00		
1.12.1.12.01.15.	Program Keluarga Berencana					198.679.600,00		
1.12.1.12.01.16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					330.612.000,00		
1.12.1.12.01.17.	Program Pelayanan Kontrasepsi					152.800.800,00		
1.12.1.12.01.18.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri					362.137.600,00		
1.12.1.12.01.20.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR					322.003.100,00		
1.12.1.12.01.22.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak					176.581.300,00		
1.12.1.12.01.23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					172.960.500,00		
1.12.1.12.01.24.	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD					169.013.100,00		
1.12.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					100.681.000,00		
1.12.1.20.09.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat					100.681.000,00		
1.12.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					226.159.500,00		
1.12.1.20.10.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat					152.812.000,00		
1.12.1.20.10.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					73.347.500,00		
1.12.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					252.003.000,00		
1.12.1.20.11.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat					191.195.000,00		
1.12.1.20.11.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					60.808.000,00		
1.12.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					159.894.500,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.12.1.20.12.19.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat					102.027.500,00		
1.12.1.20.12.21.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					57.867.000,00		
1.13.	SOSIAL					3.851.673.950,00		
1.13.1.14.01.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA					2.777.634.850,00		
1.13.1.14.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					275.092.400,00		
1.13.1.14.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					665.613.250,00		
1.13.1.14.01.18.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					400.690.100,00		
1.13.1.14.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					1.350.292.000,00		
1.13.1.14.01.22.	Program Keluarga Harapan					85.947.100,00		
1.13.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					265.001.300,00		
1.13.1.20.09.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					265.001.300,00		
1.13.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					256.776.000,00		
1.13.1.20.10.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					256.776.000,00		
1.13.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					328.515.000,00		
1.13.1.20.11.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					328.515.000,00		
1.13.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					223.746.800,00		
1.13.1.20.12.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					223.746.800,00		

KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.14.	KETENAGAKERJAAN		3.359.845.570,00
1.14.1.14.01.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA		3.359.845.570,00
1.14.1.14.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.324.925.970,00
1.14.1.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		759.015.000,00
1.14.1.14.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-
1.14.1.14.01.15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		208.854.600,00
1.14.1.14.01.16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		455.617.400,00
1.14.1.14.01.17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		611.432.600,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		6.187.608.409,00
1.15.1.15.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		3.817.311.618,00
1.15.1.15.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		974.890.734,00
1.15.1.15.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		364.218.970,00
1.15.1.15.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		44.138.500,00
1.15.1.15.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		37.181.000,00
1.15.1.15.01.15.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif		416.668.800,00
1.15.1.15.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		529.990.564,00
1.15.1.15.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		221.608.700,00
1.15.1.15.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		1.228.614.350,00
1.15.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH		2.279.812.591,00
1.15.1.20.03.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		2.279.812.591,00



KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.15.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					90.484.200,00		
1.15.1.20.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					90.484.200,00		
1.16.	PENANAMAN MODAL					430.595.200,00		
1.16.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					430.595.200,00		
1.16.1.20.03.15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					350.890.800,00		
1.16.1.20.03.16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					79.704.400,00		
1.17.	KEBUDAYAAN					35.449.810.200,00		
1.17.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					436.899.050,00		
1.17.1.01.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					436.899.050,00		
1.17.1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN					23.455.760.314,00		
1.17.1.17.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.816.623.681,00		
1.17.1.17.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					905.123.979,00		
1.17.1.17.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					43.019.600,00		
1.17.1.17.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					11.133.884.100,00		
1.17.1.17.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					5.800.178.604,00		
1.17.1.17.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					3.756.930.350,00		
1.17.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					9.325.044.836,00		
1.17.1.20.03.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					9.325.044.836,00		





KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.17.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					324.341.000,00		
1.17.1.20.09.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					324.341.000,00		
1.17.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					851.873.000,00		
1.17.1.20.10.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					851.873.000,00		
1.17.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					767.105.000,00		
1.17.1.20.11.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					767.105.000,00		
1.17.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					288.787.000,00		
1.17.1.20.12.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya					288.787.000,00		
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					10.838.126.810,00		
1.18.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					7.579.901.210,00		
1.18.1.01.01.16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					1.223.886.900,00		
1.18.1.01.01.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					6.356.014.310,00		
1.18.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					832.456.000,00		
1.18.1.20.03.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					832.456.000,00		
1.18.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					367.525.900,00		
1.18.1.20.09.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					367.525.900,00		





KODE	URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.18.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	545.356.000,00
1.18.1.20.10.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	545.356.000,00
1.18.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	1.072.642.500,00
1.18.1.20.11.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1.072.642.500,00
1.18.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	440.245.200,00
1.18.1.20.12.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	440.245.200,00
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	12.521.364.054,00
1.19.1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA	39.307.950,00
1.19.1.01.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	39.307.950,00
1.19.1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.445.794.627,00
1.19.1.19.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.159.306.164,00
1.19.1.19.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	427.866.964,00
1.19.1.19.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.872.450,00
1.19.1.19.01.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.279.826.990,00
1.19.1.19.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	996.485.059,00
1.19.1.19.01.18.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	141.550.000,00
1.19.1.19.01.20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	133.470.000,00
1.19.1.19.01.21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	254.417.000,00





KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.19.1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					5.093.381.477,00		
1.19.1.19.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.784.337.297,00		
1.19.1.19.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.484.187.350,00		
1.19.1.19.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					420.073.000,00		
1.19.1.19.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					227.644.500,00		
1.19.1.19.02.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					338.622.500,00		
1.19.1.19.02.16.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					508.490.980,00		
1.19.1.19.02.23.	Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur					58.324.850,00		
1.19.1.19.02.25.	Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban					271.701.000,00		
1.19.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					2.587.508.100,00		
1.19.1.20.03.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					2.587.508.100,00		
1.19.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT					251.690.900,00		
1.19.1.20.09.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					202.752.400,00		
1.19.1.20.09.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					48.938.500,00		
1.19.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					25.000.000,00		
1.19.1.20.10.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					25.000.000,00		
1.19.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					57.187.500,00		



KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.19.1.20.11.15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	22.650.000,00						
1.19.1.20.11.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	34.537.500,00						
1.19.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	21.493.500,00						
1.19.1.20.12.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	21.493.500,00						
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	125.679.020.510,00						
1.20.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	49.471.418.378,00						
1.20.1.20.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.066.846.473,00						
1.20.1.20.03.01.	SEKRETARIAT DAERAH	19.066.846.473,00						
1.20.1.20.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.983.106.514,00						
1.20.1.20.03.02.	BAGIAN HUKUM	15.983.106.514,00						
1.20.1.20.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	314.777.800,00						
1.20.1.20.03.03.	BAGIAN PEREKONOMIAN	314.777.800,00						
1.20.1.20.03.05.	BAGIAN ORGANISASI	333.722.584,00						
1.20.1.20.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	333.722.584,00						
1.20.1.20.03.06.	BAGIAN KEUANGAN	24.187.050,00						

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.20.1.20.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					24.187.050,00		
1.20.1.20.03.16.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					2.060.004.122,00		
1.20.1.20.03.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					3.074.746.631,00		
1.20.1.20.03.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					467.220.700,00		
1.20.1.20.03.25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					406.795.000,00		
1.20.1.20.03.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					2.594.290.240,00		
1.20.1.20.03.27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru					233.455.800,00		
1.20.1.20.03.28.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					218.221.264,00		
1.20.1.20.03.29.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					2.114.400,00		
1.20.1.20.03.30.	Program Koordinasi Pembangunan Daerah					62.005.500,00		
1.20.1.20.03.31.	Program Kerjasama Pembangunan					1.399.765.780,00		
1.20.1.20.03.34.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					38.975.000,00		
1.20.1.20.03.36.	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik					104.819.100,00		
1.20.1.20.03.37.	Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan					66.064.700,00		
1.20.1.20.03.39.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					668.043.850,00		
1.20.1.20.03.41.	Program Pengembangan Kemitraan					2.010.063.170,00		
1.20.1.20.03.45.	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah					342.192.700,00		
1.20.1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD					33.163.396.331,00		
1.20.1.20.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.629.519.548,00		
1.20.1.20.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.438.707.859,00		
1.20.1.20.04.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					7.587.300,00		
1.20.1.20.04.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					28.026.516.824,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.20.1.20.04.34.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61.064.800,00			
1.20.1.20.05.	DINAS PENDAPATAN				11.071.044.411,00			
1.20.1.20.05.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.563.069.355,00			
1.20.1.20.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.498.610.620,00			
1.20.1.20.05.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				27.000.000,00			
1.20.1.20.05.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				250.067.318,00			
1.20.1.20.05.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.732.297.118,00			
1.20.1.20.07.	INSPEKTORAT				3.725.957.671,00			
1.20.1.20.07.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.276.432.203,00			
1.20.1.20.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				615.590.674,00			
1.20.1.20.07.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				119.634.100,00			
1.20.1.20.07.20.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.506.428.700,00			
1.20.1.20.07.21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				107.269.000,00			
1.20.1.20.07.22.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				100.602.994,00			
1.20.1.20.08.	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.503.076.224,00			
1.20.1.20.08.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.161.482.483,00			
1.20.1.20.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				341.593.741,00			
1.20.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT				4.584.567.096,00			

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.20.1.20.09.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.377.598.151,00		
1.20.1.20.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.117.832.945,00		
1.20.1.20.09.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					17.979.000,00		
1.20.1.20.09.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					36.894.000,00		
1.20.1.20.09.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					34.263.000,00		
1.20.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR					5.703.470.399,00		
1.20.1.20.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					4.167.228.184,00		
1.20.1.20.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.458.072.615,00		
1.20.1.20.10.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					40.594.600,00		
1.20.1.20.10.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					37.575.000,00		
1.20.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN					7.805.557.679,00		
1.20.1.20.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					5.614.260.104,00		
1.20.1.20.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.060.261.975,00		
1.20.1.20.11.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					92.227.600,00		
1.20.1.20.11.43.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					38.808.000,00		
1.20.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA					4.489.073.217,00		
1.20.1.20.12.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.342.829.962,00		
1.20.1.20.12.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.130.741.755,00		
1.20.1.20.12.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					15.501.500,00		
1.20.1.20.13.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR					4.161.459.104,00		

KODE	URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.20.1.20.13.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.298.372.243,00
1.20.1.20.13.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.112.214.417,00
1.20.1.20.13.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	149.175.792,00
1.20.1.20.13.29.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	487.911.553,00
1.20.1.20.13.42.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	42.384.400,00
1.20.1.20.13.43.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	71.400.699,00
1.21.	KEPEGAWAIAN	3.095.676.772,00
1.21.1.20.08.	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.896.182.972,00
1.21.1.20.08.15.	Program Pendidikan Kedinasan	1.509.399.220,00
1.21.1.20.08.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	814.266.920,00
1.21.1.20.08.17.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	572.516.832,00
1.21.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	138.832.100,00
1.21.1.20.11.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	138.832.100,00
1.21.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	60.661.700,00
1.21.1.20.12.15.	Program Pendidikan Kedinasan	18.179.000,00
1.21.1.20.12.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	42.482.700,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.589.602.595,00

KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.22.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH		242.083.600,00
1.22.1.20.03.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		242.083.600,00
1.22.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT		495.943.200,00
1.22.1.20.09.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		70.987.300,00
1.22.1.20.09.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		172.177.400,00
1.22.1.20.09.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		252.778.500,00
1.22.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR		181.178.600,00
1.22.1.20.10.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		84.736.500,00
1.22.1.20.10.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		96.442.100,00
1.22.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN		497.988.100,00
1.22.1.20.11.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		217.950.000,00
1.22.1.20.11.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		280.038.100,00
1.22.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA		355.215.800,00
1.22.1.20.12.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		113.443.800,00
1.22.1.20.12.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		241.772.000,00
1.22.1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		10.817.193.295,00

KODE		URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	
1.22.1.22.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.156.871.483,00	
1.22.1.22.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	614.082.800,00	
1.22.1.22.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.857.800,00	
1.22.1.22.01.16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	448.623.610,00	
1.22.1.22.01.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2.055.534.000,00	
1.22.1.22.01.18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.156.238.940,00	
1.22.1.22.01.19.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	5.063.076.492,00	
1.22.1.22.01.20.	Program Penanggulangan Kemiskinan	279.908.170,00	
1.24.	KEARSIPAN	3.832.141.143,00	
1.24.1.24.01.	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	3.832.141.143,00	
1.24.1.24.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.401.384.402,00	
1.24.1.24.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	537.365.111,00	
1.24.1.24.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.765.150,00	
1.24.1.24.01.15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	188.832.200,00	
1.24.1.24.01.16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	273.389.700,00	
1.24.1.24.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	294.976.600,00	
1.24.1.24.01.19.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.028.673.180,00	
1.24.1.24.01.20.	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	60.754.800,00	
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.920.866.036,00	

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
1.25.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					4.153.213.212,00		
1.25.1.20.03.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					309.248.956,00		
1.25.1.20.03.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media					3.843.964.256,00		
1.25.1.20.13.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DENPASAR					119.627.100,00		
1.25.1.20.13.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media					119.627.100,00		
1.25.1.25.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.648.025.724,00		
1.25.1.25.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.118.353.017,00		
1.25.1.25.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					754.747.198,00		
1.25.1.25.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					25.693.604,00		
1.25.1.25.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					11.538.780.305,00		
1.25.1.25.01.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					130.396.200,00		
1.25.1.25.01.20.	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi					80.055.400,00		
2.	URUSAN PILIHAN					28.225.431.083,00		
2.01.	PERTANIAN					10.653.086.110,00		
2.01.1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH					68.562.438,00		
2.01.1.20.03.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)					68.562.438,00		
2.01.1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					408.003.600,00		
2.01.1.22.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)					107.649.000,00		
2.01.1.22.01.17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					300.354.600,00		
2.01.2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					5.887.241.041,00		

KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
2.01.2.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.593.720.068,00		
2.01.2.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					821.222.750,00		
2.01.2.01.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					92.444.400,00		
2.01.2.01.01.15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					403.107.150,00		
2.01.2.01.01.16.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)					1.795.804.894,00		
2.01.2.01.01.17.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					382.029.654,00		
2.01.2.01.01.18.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					289.433.500,00		
2.01.2.01.01.20.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan					509.478.625,00		
2.01.2.01.02.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN					4.289.279.031,00		
2.01.2.01.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.351.810.281,00		
2.01.2.01.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					892.393.900,00		
2.01.2.01.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					7.585.000,00		
2.01.2.01.02.21.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					400.949.500,00		
2.01.2.01.02.22.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					622.806.750,00		
2.01.2.01.02.23.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					121.034.150,00		
2.01.2.01.02.25.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani					773.431.050,00		
2.01.2.01.02.26.	Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan					119.268.400,00		
2.04.	PARIWISATA					5.477.309.305,00		
2.04.2.04.01.	DINAS PARIWISATA					5.477.309.305,00		
2.04.2.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.308.971.795,00		
2.04.2.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.001.126.800,00		



KODE	URUSAN DAN PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
2.04.2.04.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.234.200,00
2.04.2.04.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.197.961.250,00
2.04.2.04.01.16.	Program Pengembangan Destinasi Kepariwisata	1.637.642.510,00
2.04.2.04.01.17.	Program Pengembangan Kemitraan	286.372.750,00
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.404.472.000,00
2.05.2.01.02.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.404.472.000,00
2.05.2.01.02.15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	163.073.500,00
2.05.2.01.02.16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	191.230.300,00
2.05.2.01.02.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	654.145.050,00
2.05.2.01.02.21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	230.977.900,00
2.05.2.01.02.23.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	165.045.250,00
2.06.	PERDAGANGAN	6.079.512.490,00
2.06.1.20.09.	KECAMATAN DENPASAR BARAT	88.930.000,00
2.06.1.20.09.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	88.930.000,00
2.06.1.20.10.	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	112.525.000,00
2.06.1.20.10.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	112.525.000,00
2.06.1.20.11.	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	109.720.000,00
2.06.1.20.11.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	109.720.000,00
2.06.1.20.12.	KECAMATAN DENPASAR UTARA	56.340.000,00



KODE			URUSAN DAN PROGRAM			ANGGARAN		
1			2			3		
2.06.1.20.12.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					56.340.000,00		
2.06.2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					5.711.997.490,00		
2.06.2.07.01.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					470.223.000,00		
2.06.2.07.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					590.705.150,00		
2.06.2.07.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					4.651.069.340,00		
2.07.	INDUSTRI					4.611.051.178,00		
2.07.2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					4.611.051.178,00		
2.07.2.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.784.182.428,00		
2.07.2.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					642.675.500,00		
2.07.2.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					90.894.900,00		
2.07.2.07.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					1.056.662.400,00		
2.07.2.07.01.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					445.213.000,00		
2.07.2.07.01.17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					542.101.950,00		
2.07.2.07.01.19.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial					49.321.000,00		



Pemerintah Kota Denpasar



Pemerintah Kota Denpasar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

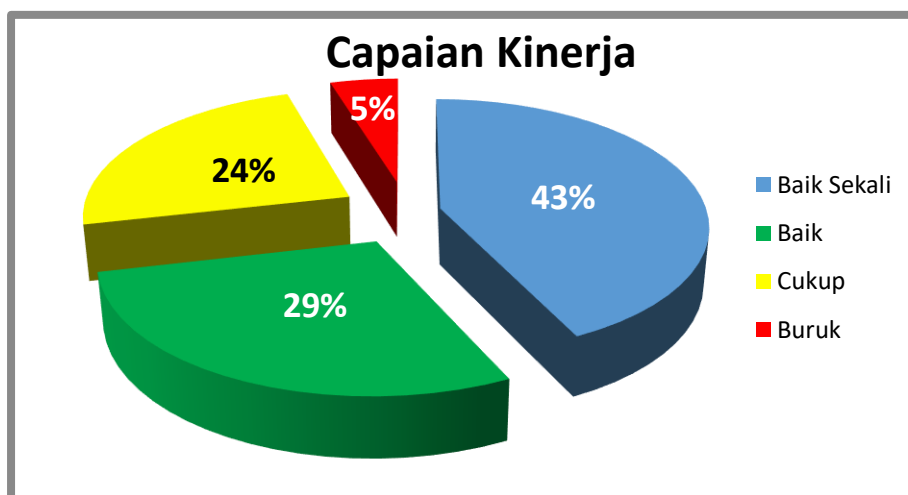
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antar target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 105,87% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas



Grafik 3.1.
Capaian Kinerja



Dari 21 sasaran yang telah ditetapkan, sebanyak 9 sasaran dinyatakan “Baik Sekali”, 6 sasaran dinyatakan “Baik”, 5 sasaran dinyatakan “Cukup” dan 1 sasaran dinyatakan “Kurang”. Sementara itu, dari 62 Indikator sasaran, belum dapat dinilai (NA) sejumlah 16 indikator mengingat Badan Pusat Statistik sampai dengan saat ini belum mengeluarkan data-data terbaru dan survey internal belum dilakukan, 1 indikator tahun 2016 baru pada tahap perencanaan/belum ada aksi dilapangan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana yang sudah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing masing tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Menguatnya Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan perkehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan dengan hal tersebut, budaya sebagai jatidiri masyarakat Kota Denpasar berupaya terus dimantapkan keberadaannya sehingga di era global ini budaya di Kota Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa tercabut dari akarnya.

Untuk mewujudkan tujuan Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut

- a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ;
- b. Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya





Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Sasaran Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
 - a). Lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali bersifat tradisional, yang telah ada sejak dahulu dan keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Lembaga tradisional tersebut antara lain Desa Pekraman, Banjar, Subak dan Sekeha.
Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang berperan di bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sasio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.
 - b). Desa pakraman merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata kram pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu unsur penting terbentuknya masyarakat hukum adat adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu





kesatuan ke dalam maupun ke luar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam desa pakraman inilah yang disebut unsur pawongan. Kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dalam wadah desa pakraman inilah yang lazim disebut kerama desa.

Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan manusia dengan alam (palemahan). Tri Hita Karana tersebut yang sampai saat ini masih eksis keberadaannya tidak dapat terlepas dari Desa Adat atau yang juga disebut dengan Desa Pakraman sebagai struktur kesatuan masyarakat hukum Adat Bali yang memiliki fungsi untuk menjaga nilai-nilai budaya yang tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana tersebut. Peran Desa Pakraman yang tidak hanya untuk menjaga persoalan keagamaan dalam menjaga keseimbangan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan masyarakat tetapi tidak kalah pentingnya juga menjaga keharmonisan alam lingkungan di wilayahnya yang dilakukan dengan cara duniawi dan akhirat (sekala dan niskala) dilakukan oleh warga Desa Pakraman. Terlihat bahwa krama desa pakraman memegang peran penting dalam menjaga tetap eksisnya desa pakraman.

- c). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bernaung dibawah Desa Pakraman memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di pedesaan. Keuntungan LPD digunakan untuk membangun kehidupan religius warga berikut kegiatan upacaranya. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan untuk mendorong agar

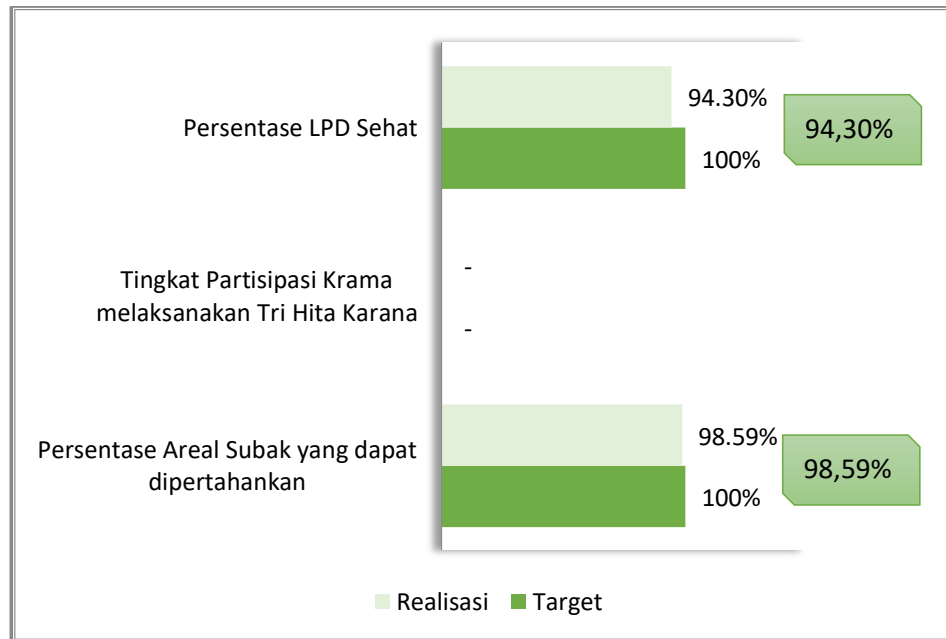
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





seluruh LPD memiliki likuiditas yang baik sehingga masuk dalam katagori sehat.

Capaian terhadap Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional adalah seperti tabel berikut:



Grafik 3.2.
Capaian terhadap Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional di Kota Denpasar

- Pada Tahun 2016 terjadi alih fungsi lahan seluas 35 hektar, semula pada tahun 2015 luas sawah di Kota Denpasar 2.479 ha dan berkurang menjadi 2.444 hektar di tahun 2016. Alih fungsi lahan ini terjadi di subak Paang seluas 2 hektar, subak Taman seluas 1 hektar, subak temaga seluas 1 ha, subak padang galak seluas 2 hektar, subak sidakarya 2 hektar, subak kepaon 2hektar,subak tegalantang 4 hektar, subak lange 2 hektar, subak dalem 4 hektar, subak lungatad 3 hektar, subak kedua 2 hektar, subak pakel 2 hektar, subak petangan 5 hektar, subak Praupan timur seluas 2 hektar dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





subak praupan barat seluas 5 hektar.

Rendahnya nilai tambah sektor pertanian dibanding dengan sektor lapangan usaha lain menjadi kendala dalam



Alih fungsi lahan pertanian

mempertahankan areal subak ini dan

didukung juga dengan rendahnya luasan

kepemilikan lahan pertanian di Kota

Denpasar. Namun upaya untuk

mempertahankan

lahan pertanian tetap dilakukan antara lain melalui pemberian insentif kepada petani berupa pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada areal sawah yang berada dalam KDB 0%, disamping peningkatan kapasitas subak baik berupa manajemen, komoditi pertanian maupun pembenahan infrastruktur irigasi.

- Krama sebagai penggerak desa pakraman memegang peran penting dalam melestarikan desa pakraman yang ada. Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempertahankan nilai nilai budaya. Partisipasi krama dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan desa pakraman yang berkaitan erat dengan aktifitas budaya menjadi tolok ukur keberlanjutan desa pakraman ke depan. Capaian akuntabilitas dengan mengukur tingkat partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana penilaiannya belum dapat ditampilkan, mengingat survey partisipasi ini baru akan dilaksanakan pada triwilan tiga tahun ini
- Setiap Desa Pekraman di Kota Denpasar memiliki Lembaga





Perkreditan Desa sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 unit. Sampai dengan tahun 2015, LPD yang termasuk dalam kategori cukup sehat berjumlah 2 unit yaitu LPD Serangan dan LPD Oongan. Setelah adanya pembenahan manajemen, masih belum sehatnya kedua LPD tersebut lebih dikarenakan masih kekurangan modal yang disetor, sehingga berpengaruh terhadap tingkat likuiditasnya

- 2). Sasaran Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pecalang berasal dari kata "calang" dan menurut theologinya diambil dari kata "celang" yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat artikan secara bebas, "Pecalang" adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desaadatnya. Dapat



Walikota Denpasar bersama perwakilan pecalang se-Kota Denpasar

diibaratkan bahwa pecalang sebagai petugas keamanan desa adat. Pecalang telah terbukti ampuh mengamankan jalannya upacara-upacara yang

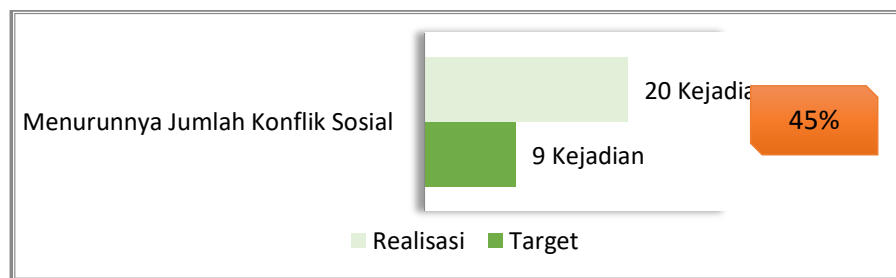
berlangsung di desa adatnya, bahkan secara luas mampu mengamankan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan khalayak ramai. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pecalang baik secara langsung maupun melewati Desa Pekramannya, sehingga diharapkan Pecalang lebih berperan lagi dalam mengamankan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah adatnya.





Akomulasi peran pecalang di masing masing desa pekraman diharapkan mampu menurunkan konflik social yang terjadi di Kota Denpasar.

Capaian terhadap Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:



Grafik 3.3.

Capaian terhadap Memberdayakan lembaga keamanan tradisional di Kota Denpasar

- Target jumlah konflik pada tahun 2016 diasumsikan jumlahnya sama dengan tahun 2015. Terjadi peningkatan jumlah konflik di Kota Denpasar pada tahun 2016 yang semula 9 konflik menjadi 20 konflik social. Sehingga pencapaian kinerjanya hanya 45%. Meningkatnya jumlah konflik ini, terjadi akibat adanya gesekan antara ormas.
- 3). Sasaran Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya. Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Kota Denpasar.





Capaian terhadap Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.4.

Capaian terhadap Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya di Kota Denpasar

- Sekaa yang ikut terlibat dalam festival budaya daerah pada tahun 2016 ditargetkan 100 sekaa ternyata antusias sekaa yang tinggi dan yang ikut dalam festival menjadi berjumlah 117 sekaa sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 117%. Capaian ini disebabkan pembinaan yang terus menerus dilakukan dan memberik ruang yang lebih, baik kepada sekaa, sanggar maupun sekolah untuk ikut serta dalam berbagai event kesenian yang dilaksanakan di Kota Denpasar, seperti:
 - Pesta Kesenian Bali.
 - Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik.
 - Festival ogoh-ogoh.
 - Pementasan rutin sanggar setiap hari sabtu dan minggu di lapangan Puputan Badung.





- Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari-hari tertentu di Pura Jagatnatha.
 - Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung.
 - Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar di setiap akhir tahun.
 - Kaderisasi Pelestarian Budaya.
 - Misi Kesenian ke Luar Daerah.
 - Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali.
 - Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan.
- Jumlah sanggar yang ikut terlibat dalam pentas budaya berjumlah 44 sanggar sesuai dengan besaran target yang ditetapkan pada tahun 2014, sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 100%.
 - Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekat yang biasanya



Pawai Ogoh-ogoh

dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan tahunan “upacara pembersihan” (ngerupakan), yang dilaksanakan sehari

sebelum perayaan Nyepi. Semua Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda di tingkat banjar) yang ada di Denpasar terlibat aktif dalam keikutsertaan parade ogoh ogoh ini sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya 100%.

Pembinaan kepada STT salah satunya melalui lomba ogoh





ogoh berupaya terus dilakukan, agar kreatifitas, gotong royong, seni gamelan, seni tari dan seni anyaman dapat terus dijaga bahkan dikembangkan sebagai salah satu aset budaya.

2. Tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan dan social serta pemerataan infrstruktur
Tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat ini berkaitan dengan upaya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan dan social serta pemerataan infrstruktur dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut

- a. Mengentaskan Kemiskinan dan pengangguran.
- b. Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil.
- c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
- d. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan.
- e. Meningkatnya infrastruktur.

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Sasaran Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan.



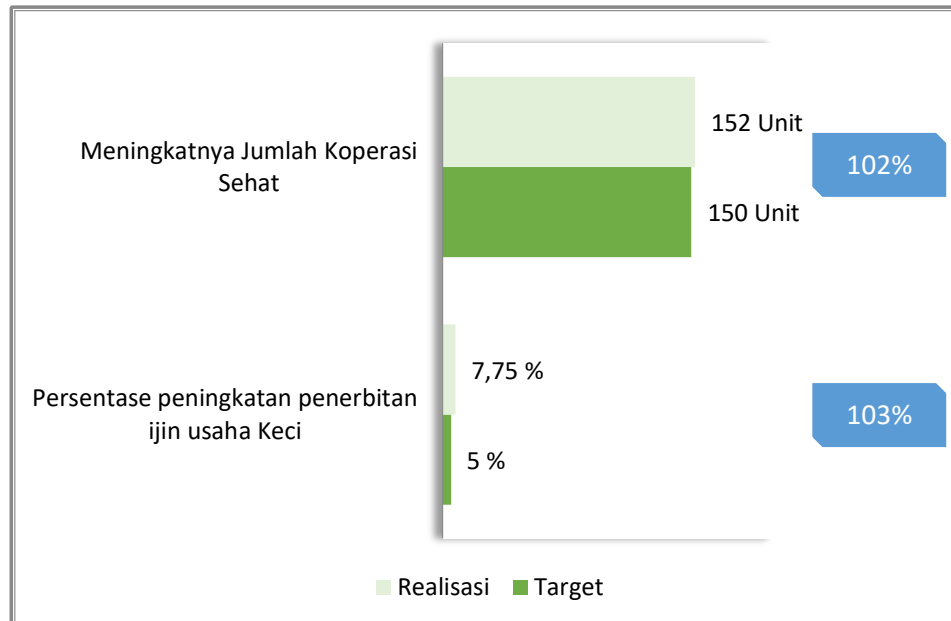


- Capaian terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran belum dapat ditampilkan mengingat BPS belum mengeluarkan data untuk penduduk miskin dan pengangguran ini
- 2). Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil
- Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara ekonomi akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar
- Disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.
- Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.





Capaian terhadap upaya Meningkatkan Perkembangan Ekonomi masyarakat kecil adalah sebagai berikut:



Grafik 3.5.

Capaian terhadap upaya Meningkatkan Perkembangan Ekonomi masyarakat kecil di Kota Denpasar

- Ijin usaha kecil yang ditargetkan pada tahun 2016 meningkat 5% ternyata mampu direalisasikan 7.75% dengan capaian kinerja 155%. Hal ini terjadi karena pembinaan, pelatihan ketrampilan, bantuan peralatan, dan menyederhanakan persyaratan maupun proses perijinan.



Pelayanan Perijinan Mobil Keliling bagi UKM di Kota Denpasar dengan menyasar Pedagang di Pasar Tradisional.





- Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi, yaitu bagi anggota koperasi dan juga bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembinaan kepada koperasi melalui perkuatan modal, bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan terutama menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus, menyusun laporan keuangan dan neraca laba rugi. Upaya ini menunjang tercapainya pencapaian koperasi sehat dari target 150 koperasi dan mampu direalisasikan 152 koperasi sehingga pencapaian akuntabilitasnya sebesar 101%

3). Sasaran Meningkatnya pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan Gender adalah terjemahan dari Gender Mainstreaming. Suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi pertimbangan utama dalam setiap perumusan kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan.

Pengarusutamaan gender memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama dalam pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam pembangunan dan mempunyai kontrol yang sama dalam pembangunan

Capaian terhadap upaya Meningkatnya pengarusutamaan gender belum dapat dihitung mengingat BPS belum mengeluarkan datanya.

4). Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan.

Pada tahun 2016 upaya yang dilakukan untuk mengurangi permukiman kumuh di Denpasar baru sebatas menyiapkan perencanaan dengan melakukan pendataan secara mendetail





untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan yang terjadi. Pada tahun ini juga dilakukan upaya menyiapkan produk hukum terkait dengan kekumuhan sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan kedepan.

Kekumuhan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan terjadi pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam waktu jangka panjang.

Sinergitas penanganan kumuh terus dilakukan sehingga terjadi keterpaduan pendanaan dan program antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar opd di Kota Denpasar.

Capaian terhadap upaya Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan belum dapat dihitung mengingat belum ada target di tahun 2016 untuk mengurangi luasan tersebut.

5). Sasaran Meningkatnya Infrastruktur.

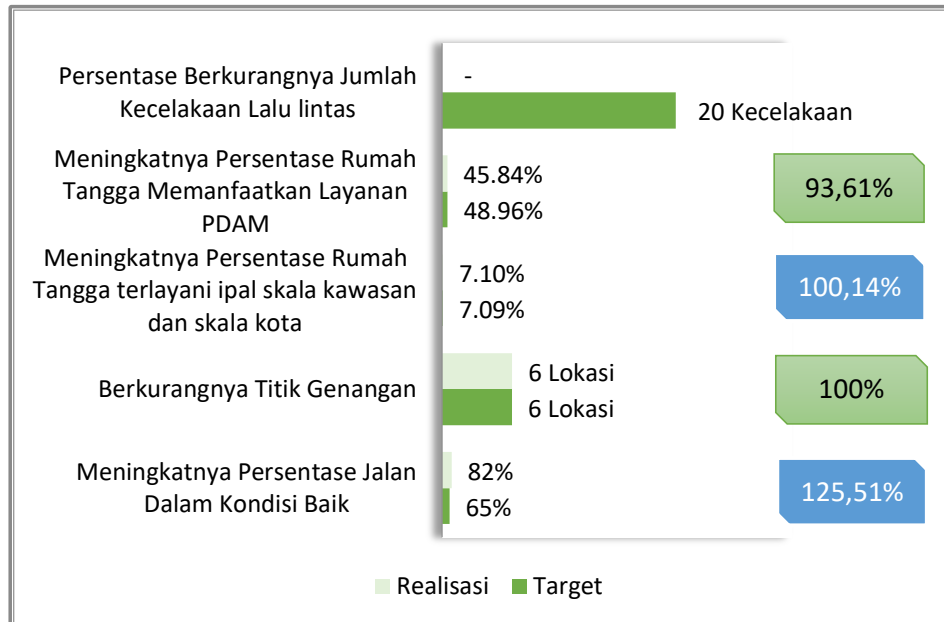
Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.





Capaian terhadap upaya Meningkatnya Infrastruktur adalah sebagai berikut:



Grafik 3.6.

Capaian terhadap upaya Meningkatnya Infrastruktur di Kota Denpasar

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

- Titik genangan berupaya terus dikurangi keberadaannya, mengingat apabila tidak ditangani dapat menghambat aktifitas sosial maupun ekonomi di Kota Denpasar. Keterbatasan dana mengharuskan memilih prioritas dalam penanganannya. Tahun 2016 ditargetkan adanya pengurangan 6 lokasi genangan dan





- dapat direalisasikan semuanya yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 100%.
- Tingginya harga lahan menyebabkan semakin kecilnya lahan yang digunakan untuk perumahan. Jarak minimal 10 meter antara sumur dengan septikteng kecil kemungkinannya untuk dapat dipenuhi. Berkaitan dengan hal ini meningkatkan rumah tangga terlayani Ipal skala kawasan dan skala kota menjadi prioritas untuk dilakukan. Pada Tahun 2016 ditargetkan 7,09% dapat direalisasikan 7,10%. Sosialisasi akan pentingnya penanganan limbah cair rumah tangga menjadi kunci tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam program ini.
 - Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup terutama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa suplai air sehingga upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan suplai air bersih menjamin hal penting untuk dilakukan. Pemerintah Kota Denpasar mendorong PDAM selaku Badan Usaha Milik Daerah untuk terus meningkatkan cakupan layanannya. Peningkatan penyertaan modal dan hibah barang modal berupa hasil pembangunan jaringan pipa yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum merupakan upaya konkrit yang dilakukan. Pada tahun 2016 target capaian pelayanan sebesar 48,96% dan hanya mampu direalisasikan sebesar 45,84% dengan tingkat pencapaian sebesar 93.61%. Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan target sehingga target tidak dapat dipenuhi lebih dikarenakan karena kendala teknis, akibat tidak optimalnya pasokan air dari IPA Petanu.
 - Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU RI No. 22 Tahun 2009). Kecelakaan terjadi jika salah satu unsur lalu lintas tidak berfungsi





sebagaimana mestinya. Target penurunan kecelakaan lalu lintas sekitar 20%, angka ini diperoleh dari rata rata data kecelakaan 4 tahun terakhir. Realisasi dan akuntabilitasnya belum dapat disajikan mengingat BPS belum mengeluarkan data terbaru.

3. Tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)



Kunjungan MenPAN & RB ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Kota Denpasar

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma
- b. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- c. Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.
- d. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*law enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

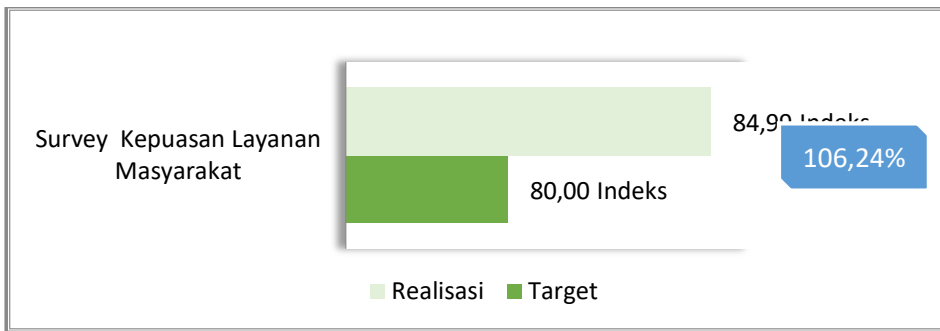
Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma.

Sewaka Dharma merupakan filosofi yang digali dari Budaya Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sewaka Dharma mengandung arti bahwa melayani merupakan kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat dan melayani sebagai bagian dari ibadah kebaikan

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma adalah sebagai berikut:





Grafik 3.7.
 Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma di Kota Denpasar

Capaian sasaran ini mencapai 106,24% yang berarti realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan. Indeks Survey kepuasan layanan masyarakat ini diperoleh dari merata ratakan nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada OPD Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas, dan Rumah Sakit Wangaya.



Walikota Denpasar memberikan pengarahannya dalam rapat kerja Pembangunan dengan seluruh Perangkat Daerah awal Tahun Anggaran 2016

2). Sasaran Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya:

Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih dirasa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terkait dengan kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih

lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong

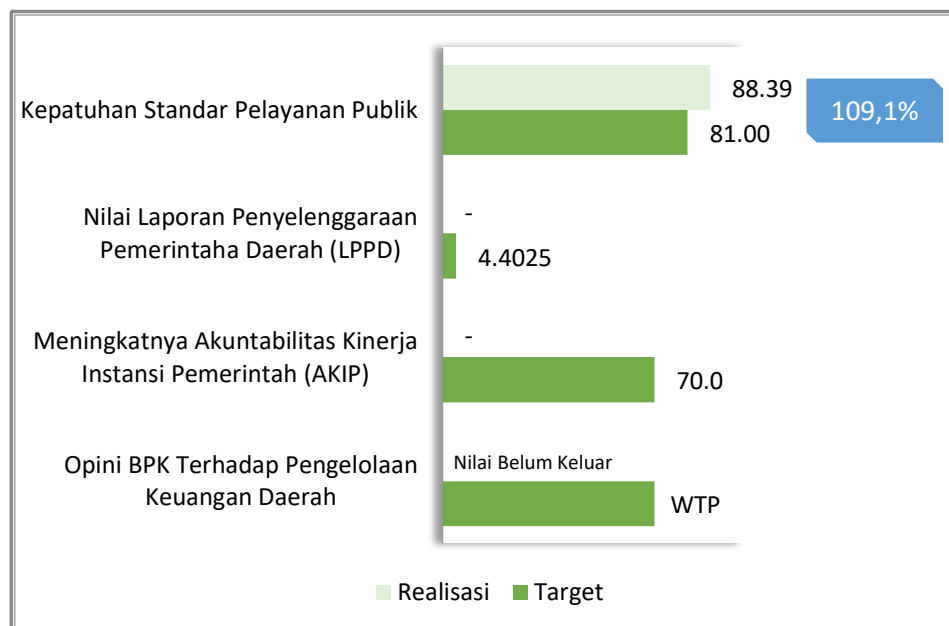
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.8.

Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan pada tahun 2016 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2015 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini sama dengan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan opini WTP dari BPK berupa perbaikan pengelolaan keuangan , perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang





bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Penilaian kinerja terkait dengan Laporan Keuangan tahun 2016 belum dapat dilakukan mengingat hasil penilaian BPK belum keluar.

- Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Denpasar yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, untuk tahun 2015 mendapat “Kategori B” dengan nilai 60,98, penilaian ini meningkat dari hasil penilaian pada tahun 2014 dimana Kota Denpasar termasuk dalam kategori “CC” dengan nilai 55,55.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas terus berupaya dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Menpan RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akutabilitas Aparatur dan Pengawasan hasil evaluasi laporan akuntabilitas.

Penilaian kinerja terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 belum dapat dilakukan mengingat penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB masih dalam rangkaian proses penilaian.

- LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja terkait capaian LPPD belum dapat dilakukan mengingat hasil penilaian LPPD Tahun 2016 belum keluar.
- Kepatuhan terhadap layanan publik capaian kinerjanya mencapai 109.1% yang berarti target memperoleh nilai sebesar 81.00 dapat direalisasikan dengan perolehan nilai 88,39. Pencapaian ini dicapai berkat upaya menyediakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016



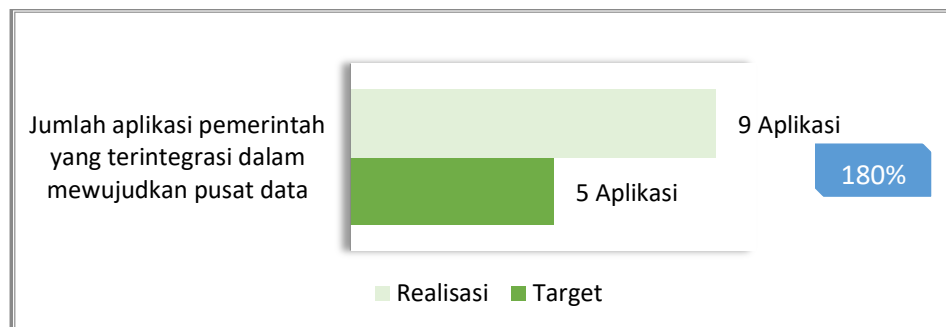


pelayanan khusus dan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, melakukan pengukuran kepuasan pelanggan secara menerus dan menyediakan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan.

- 3). Sasaran Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.

Reformasi birokrasi akan tetap relevan dilaksanakan mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan terus mengalami pergeseran. Cepat, tepat dan transparan menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari ketika kita berbicara tentang pekeyanan publik. Berkaitan dengan hal ini, pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi alat yang tepat untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik kepada masyarakat

Capaian terwujudnya Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas adalah sebagai berikut :



Grafik 3.9.

Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar

- Capaian 180% akibat mampunya mengintergrasikan aplikasi yang tersebar di OPD guna mewujudkan Pusat Data. Aplikasi yang telah terintegrasi dengan pusat data antara lain:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





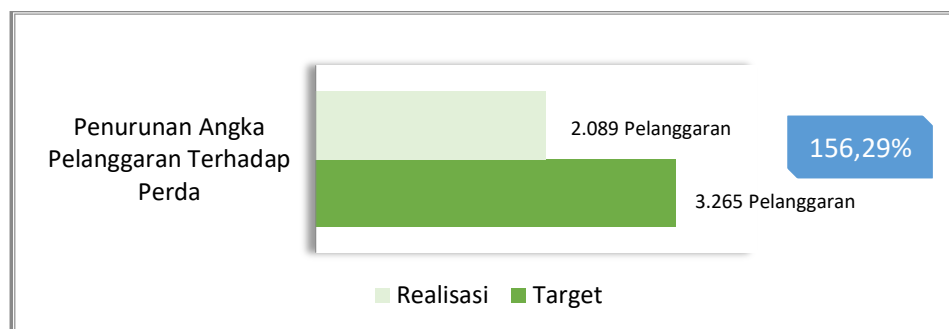
- a. SIM-Perijinan
- b. E-Commerce
- c. SIMPEG
- d. Sistem Informasi PBB
- e. Sistem Informasi Pajak Daerah
- f. Sistem Informasi SSPD BPHTB
- g. Dapodik
- h. Pendataan PAUDNI
- i. Cyberschool Denpasar

4) Sasaran Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Supremasi hukum merupakan ide normatif untuk mencegah atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya *equality before the law*.

Penegakan supremasi hukum, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat akan peraturan yang telah ditetapkan termasuk peraturan daerah

Capaian Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai berikut :



Grafik 3.10.

Capaian Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar





- Umumnya pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran kependudukan, pedagang kaki lima, kawasan tanpa rokok, pemasangan reklame tidak pada tempatnya atau habis masa berlakunya dan pelanggaran terhadap ijin bangunan. Terjadinya penurunan jumlah pelanggaran menandakan Peraturan Daerah telah tersosialisasikan dengan baik dan ketaatan masyarakat dalam mengurus perijinan. Target pelanggaran menurun 10 persen dari jumlah pelanggaran tahun 2014 yang jumlahnya 3.628 pelanggaran dan mampu diturunkan menjadi 2.089 pada tahun 2016 dengan tingkat capaian 156.29.
4. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan
- Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial secara baik.
- Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut
- a. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat
 - b. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan
 - c. Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan
 - d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan
 - e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan
 - f. Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya





Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari besaran nilai Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM merupakan muara dari capaian pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan sector perekonomian. IPM Kota Denpasar tergolong tinggi yaitu 82,24 yang telah dicapai pada tahun 2014. Untuk meningkatkan nilai ini relatif berat karena dampak pelaksanaan program kegiatan secara umum kecil kemungkinan pengaruhnya untuk meningkatkan IPM ini. Dibutuhkan upaya yang sifatnya inklusif yang langsung menuju kelompok yang disasar dalam melaksanakan program kegiatan. Memberikan beasiswa, bedah rumah, pendidikan formal dan informal, asuransi kesehatan, peningkatan kapasitas ekonomi melalui pelatihan, membantu akses permodalan merupakan upaya yang telah dilakukan. Penilaian kinerja terkait capaian Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat belum dapat dilakukan mengingat BPS belum mengeluarkan IPM Tahun 2016.

2). Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Struktur perekonomian di wilayah perkotaan umumnya ditandai dengan berkembangnya sector tersier dan sekunder melebihi perkembangan sector primer. Industri pengolahan termasuk dalam sector sekunder dan perdagangan termasuk dalam sector tersier.

Pada tahun 2015 Industri pengolahan menyerap tenaga kerja 48.863 orang atau 10,43% dan Perdagangan menyerap 220.739 orang atau 47,11% dari penduduk Kota Denpasar yang berusia kerja. Capaian sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan adalah belum dapat diukur mengingat BPS belum

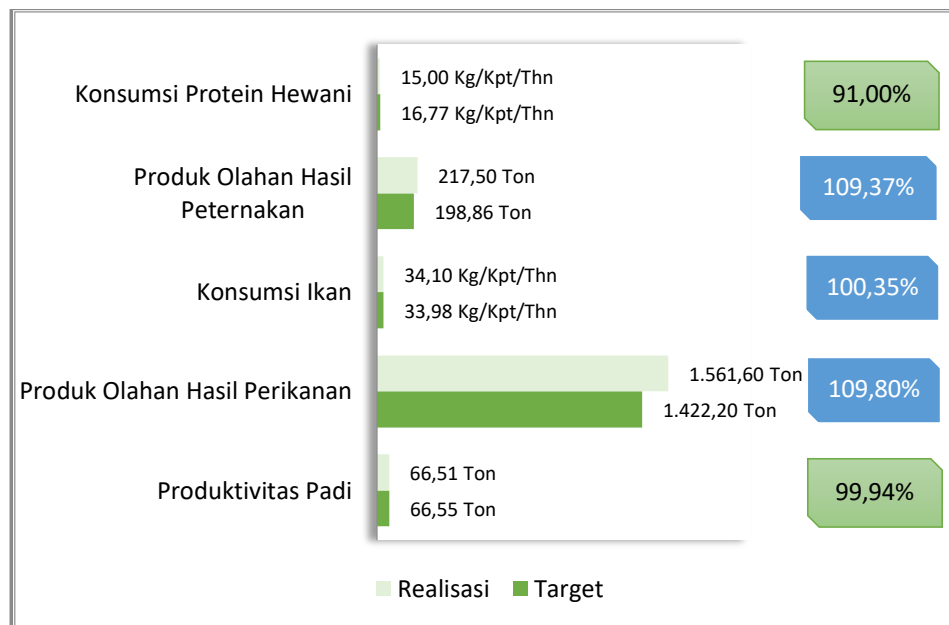




mengeluarkan Produk Domestik Brutto Kota Denpasar Tahun 2016.

3). Sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan

Pertanian di Kota Denpasar memiliki arti penting karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi, budaya dan lingkungan walaupun rendahnya luas lahan pertanian dan tingkat kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar. Capaian sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut :



Grafik 3.11.
Capaian sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar

- Rata rata terjadi pengurangan lahan pertanian seluas 31 Ha dalam lima tahun terakhir. Upaya untuk meningkatkan produksi terkendala karena faktor ini. Hal yang masih memungkinkan dilakukan adalah mengejar kenaikan produktivitas khususnya komoditi Padi. Produktivitas padi





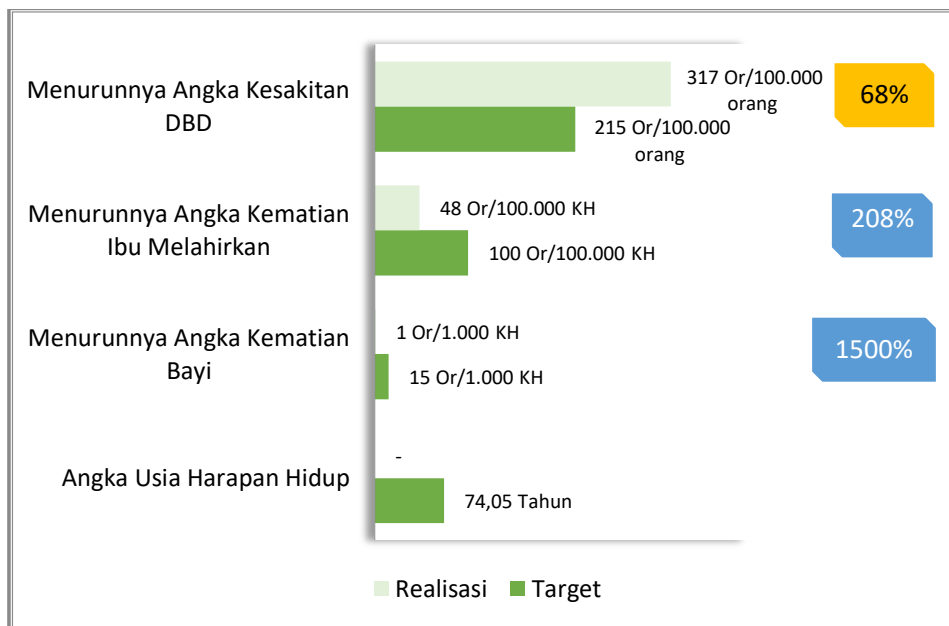
- pada tahun 2016 ditargetkan 66,55 ton/ha dan hanya mampu direalisasikan 66,51 ton/ha dengan capaian 99,94%
- Produk Olahan Hasil Perikanan ditargetkan 1.422.20 ton dan mampu direalisasikan 1.561.60 ton dengan capaian kinerja 109.80%. Tercapainya produk olahan ini disebabkan karena pembinaan secara menerus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha kecil industri pengolahan hasil tangkapan
 - Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Capaian kinerja guna meningkatkan konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2016 mencapai 100.35%. Peningkatan konsumsi ikan ini disebabkan oleh ketersediaan ikan sebagai hasil produksi baik tangkapan maupun budidaya dari kota Denpasar maupun dari daerah lain
 - Produk Olahan Hasil Peternakan ditargetkan 198.86 ton dan mampu direalisasikan 217.5 ton dengan capaian kinerja 109.37%. Tercapainya produk olahan ini disebabkan karena secara menerus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha kecil industri peternakan
 - Angka konsumsi Protein Hewani merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas Peternakan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Capaian kinerja guna meningkatkan konsumsi Protein Hewani masyarakat pada tahun 2016 mencapai 91%, yang berarti target 16.77 kg/kpt/th tidak terpenuhi dan hanya mampu direalisasikan 16 kg/kpt/th. Tidak tercapainya target konsumsi protein hewani ini disebabkan adanya alternatif untuk pemenuhan protein ini dari produk perikanan





4). Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat. Tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tidak semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta. Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan adalah sebagai berikut :



Grafik 3.12.

Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan di Kota Denpasar

- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Angka harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Muara keberhasilan pembangunan kesehatan tercermin dari usia harapan hidup ini. Tahun 2016, angka harapan hidup ditargetkan 74,05 tahun dan realisasi maupun pencapaiannya belum dapat ditampilkan karena BPS belum merilis data ini.





- Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Tahun 2016 kematian bayi dapat ditekan hingga hanya 1 orang per 1000 kelahiran hidup dari target 15 orang per kelahiran hidup dengan capaian kinerja 1.500%. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian menyebabkan menurunnya tingkat Angka Kematian Bayi ini.
- Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu melahirkan secara umum disebabkan dua hal yaitu infeksi dan pendarahan. Untuk kasus infeksi, dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, dan klinik kesehatan. Sedangkan kasus pendarahan saat melahirkan berkaitan dengan empat hal utama, yakni melahirkan ketika usia muda, melahirkan ketika usia tua, melahirkan terlalu sering, dan jarak waktu melahirkan bayinya terlalu dekat atau rapat. Pada tahun 2016 ditargetkan kematian ibu melahirkan sejumlah 100 orang per 100.000 kelahiran hidup dapat diturunkan realisasinya menjadi 48 orang per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian 208%. Keberhasilan capaian ini menunjukkan program kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan keluarga berencana telah dilakukan dengan baik.
- Angka Kesakitan DBD sangat ditentukan oleh karakteristik & jenis nyamuk penularnya serta agent penyebabnya (virus, parasit, cacing filaria atau mikroorganisme lain). Namun secara

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





umum peran serta masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran & penularan penyakit-penyakit yang ditularkan nyamuk merupakan faktor yang paling penting. Untuk itu diharapkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung program pemerintah untuk pengendalian penyakit-penyakit tersebut antara lain dengan cara meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjaga sanitasi lingkungan dengan optimal, menggiatkan dan merutinkan kegiatan PSN 3M plus di masing-masing rumah tangga dan sebagainya. Pada tahun 2016 ditargetkan kesakitan DBD sebanyak 215 orang per 100.000 orang dan target ini tidak mampu dicapai akibat angka kesakitan DBD tahun 2016 mencapai 317 per 100.000 orang dengan tingkat capaian kinerja 68%. Perlu upaya bersama untuk tetap meningkatkan perilaku hidup bersih di masyarakat agar angka kesakitan DBD dapat ditekan.

- 5). Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan
Pendidikan menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula.
Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2

Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan di Kota Denpasar

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	95.12	97.96	102.99
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105	100.69	95.90
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	105	107.50	102.38
4	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	105	104.84	99.85
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91.82	89.43	97.40
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79.83	79.97	100.18
7	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71.01	73.94	104.13
8	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	103.13	90.87	88.11
9	Angka Partisipasi	%	110.22	81.97	74.37



No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Sekolah Usia 13-15 Tahun				
10	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	%	70.20	74.05	105.48
11	Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	%	100.00	99.73	99.73
12	Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00
13	Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100.00	100.00	100.00

- Melek huruf diukur dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melak huruf tahun 2016 ditargetkan 95.12% dan direalisasikan sebesar 97.96% dengan capaian kinerja sebesar 102.99%. Pencapaian kinerja ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan penggunaan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran
- Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





persentase. APK sebagai indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu. APK di Kota Denpasar di targetkan 105%, dengan asumsi bila seluruh murid menempuh pendidikan sesuai jenjangnya maka Kota Denpasar memberikan 5% kesempatan kepada penduduk diluar Kota Denpasar untuk menempuh pendidikan di Kota Denpasar. Capaian kinerja APK SD/MI sebesar 95.90%, APK SMP/MTs sebesar 97.67% dan APK SMA/SMK/MTs sebesar 99.85%.

- Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD/MI ditargetkan sebesar 91.82%, APM SMP/MTs ditargetkan sebesar 79,83% dan APM SMA/SMK/MA ditargetkan 71.01% terealisasi masing masing; SD/MI 89.43%, SMP/MTs 79.97%, SMA/SMK/MA 73.94%, dengan capaian kinerja masing masing sebagai berikut; SD/MI 97.40%, SMP/MTs 100.18%, SMA/SMK/MA 104.13%.

Arti angka capaian APM tersebut adalah:

- APM SD/MI 89.43% berarti terdapat 89.43% penduduk yang berusia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI.
 - APM SMP/MTs 79,97% berarti terdapat 79,97% penduduk yang berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs.
 - AMP SMA/SMK/MA 73.94% berarti terdapat 73.94% penduduk yang berusia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK/MA.
- APS (Angka Partisipasi Sekolah): Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sebagai indikator

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





dasar untuk mengukur akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS Tahun 2016 di targetkan masing masing; Usia 7-12 tahun sebesar 103.13% , usia 13-15 tahun sebesar 110.22% , usia 16-18 tahun sebesar 70.20% dengan capai masing masing; Usia 7-12 tahun sebesar 90.87% , usia 13-15 tahun sebesar 81.97%, usia 16-18 tahun sebesar 74.05%. Capaian APS ini mengandung arti:

- APS Usia 7-12 tahun sebesar 90.87% menandakan masih ada 9,13% penduduk yang tidak bersekolah di SD/MI
- APS usia 13-15 tahun sebesar 81.97% menandakan masih ada 18,03% penduduk yang tidak bersekolah di SMP/MTs
- APS usia 16-18 tahun sebesar 74.05% menandakan masih ada 25,95% penduduk yang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA

Bila dilihat capaian kinerjanya masingmasing berkinerja sebesar; APS usia 7-12 tahun 88.11%, APS usia 13-15 tahun 74.37%, APS usia 16-18 tahun 105.48%

6). Sasaran Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan.





Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya.

Spend of money memiliki arti penting ketika kita membicarakan seberapa besar “trickle down effect” sektor pariwisata memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Besaran dana yang dibelanjakan oleh wisatawan selama tinggal di Kota Denpasar diharapkan meningkat setiap tahunnya. Capaian sasaran Meningkatkan Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya adalah sebagai berikut :



Grafik 3.13.
Capaian sasaran Meningkatkan Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya di Kota Denpasar

- Keberhasilan pengembangan pariwisata dilihat dari kedatangan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Wisatawan yang datang ke Kota Denpasar pada tahun 2016 berjumlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





625.431 orang melebihi target yang telah dicanangkan sebesar 522.679 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 119.66%. Keberhasilan mendatangkan wisatawan ditengah lesunya perekonomian global ini, tidak lepas dari promosi yang dilakukan, baik promosi oleh pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

- Lama tinggal wisatawan di Bali ada kecenderungan mengalami penurunan, perlu lebih dicermati lagi penyebabnya untuk dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga tahun mendatang lama tinggal dapat ditingkatkan lagi. Sedangkan Lama Tinggal wisatawan di Kota Denpasar untuk tahun 2016 belum dapat ditampilkan mengingat BPS belum melakukan rulis data.
 - Capaian indicator “Spend of money” juga belum dapat ditampilkan, mengingat survey baru akan dilaksanakan pada triwulan tahun ini.
6. Tujuan Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tri Hita Karana merupakan sebuah konsep untuk menghasilkan keharmonisan yang sempurna, konsep yang lahir dari ajaran-ajaran agama Hindu berhubungan dengan bagaimana hubungan manusia dengan apa yang ada disekitarnya dan yang menciptakannya. Untuk mewujudkan tujuan Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut





- a. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.
- b. Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat
- c. Meningkatkan Kerukunan Beragama

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1). Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali

kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal

Aspek penataan ruang yang berkaitan dengan lingkungan adalah Ruang terbuka hijau yang memiliki pengertian sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

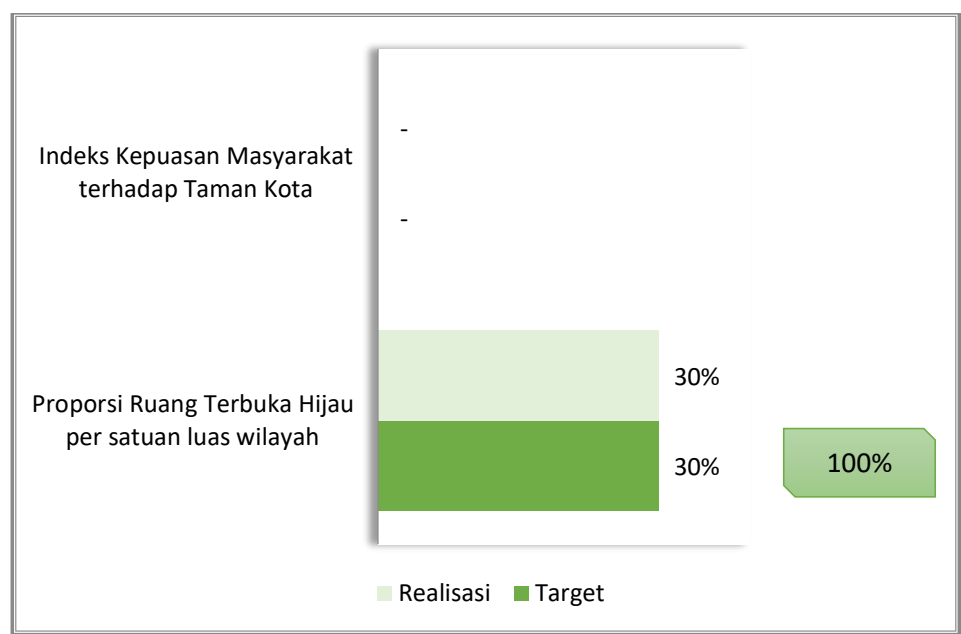
- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan





- kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Mengingat pentingnya arti RTH bagi keberlanjutan, maka keberadaan RTH berupaya dipertahankan sesuai dengan amanat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Capaian Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali adalah sebagai berikut :



Grafik 3.14.
Capaian Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali di Kota Denpasar

- Pemanfaatan RTH sebagai tempat rekreasi warga melalui taman taman tematik yang dibangun oleh Pemerintah Kota Denpasar. Indek kepuasan warga terhadap taman taman tersebut belum dapat disajikan mengingat survey tentang kepuasan ini baru direncanakan. Sedangkan upaya untuk mempertahankan RTH 30% secara massif terus dilakukan

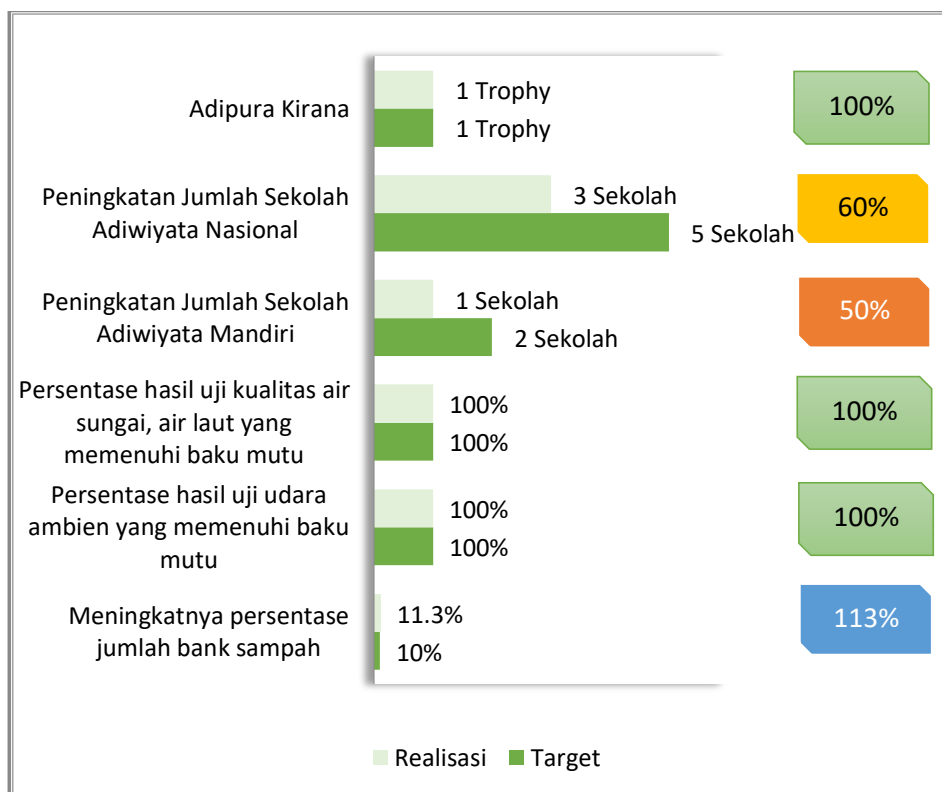


melalui kegiatan monitoring dan juga melibatkan masyarakat dengan memberi akses yang luas melalui aplikasi online Pro Denpasar untuk mengadukan pelanggaran tataruang yang terjadi.

2). Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah.

Capaian Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat adalah sebagai berikut :





Grafik 3.15.

Capaian Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat di Kota Denpasar

- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak akan bisa menampung sampah yang terus menerus dihasilkan masyarakat jika masyarakat tidak mulai bertindak untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Untuk itulah penanganan masalah sampah harus dimulai dari sumbernya. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat 'berkawan' dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Capaian akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan jumlah bank sampah adalah sebesar 113%, mengingat target berdirinya bank sampah baru 10% dari semula di tahun 2015 sejumlah 62 unit dan dapat terlampaui menjadi 69 unit pada tahun 2016. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat, sehingga kedepan diharapkan jumlah sampah yang dibawa ke TPA dapat dikurangi
- Untuk pengujian kualitas ambien di kota denpasar tahun 2016 dilakukan pengambilan sample di 18 lokasi pengukuran yang mewakili daerah kawasan pariwisata, kawasan





pemukiman/padat penduduk, kawasan padat lalu lintas dan kawasan fasilitas umum.

Secara menyeluruh ditinjau dari semua parameter yang dipantau, kualitas udara di kota Denpasar cukup baik karena semua parameter SO_2 , NO_2 , CO , O_3 , HC , Pb , PM_{10} , $PM_{2,5}$, dan TSP masih dibawah nilai ambang batas pencemaran yaitu sesuai pergub provinsi Bali No 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup

- Pemantauan kualitas air sungai ditetapkan 11 sample air sungai dan dari pemantauan air sungai dapat dikatakan telah mengalami penurunan kualitas air tetapi masih dalam ambang batas pencemaran. Pemantauan sejenis juga dilakukan di 10 titik sample air laut, dengan hasil masih dalam kriteria ambang batas.
- Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil melestarikan lingkungan hidup yang melibatkan setiap warga sekolah. Tujuan program adiwiyata adalah agar sekolah menjadi tempat pembelajaran yang sehat dan nyaman, sehingga mendukung kegiatan belajar di sekolah serta membangun rasa sadar dan peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Tahun 2016 Kota Denpasar memperoleh 1 trophy adiwata mandiri dari 2 sekolah yang ditargetkan untuk memperoleh trophy tersebut. Disamping itu juga 3 sekolah mampu meraih trophy adiwiyata nasional dari 5 sekolah yang diajukan untuk meraihnya.
- Adipura adalah merupakan program tahunan kementerian lingkungan hidup untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam



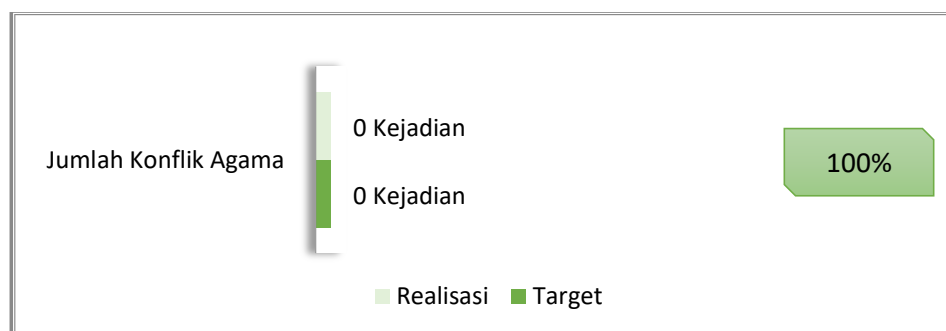


melaksanakan pemerintahan yang baik di bidang hidup. Dari hasil penilaian untuk perolehan trophy adipura, tahun 2016 kota Denpasar memperoleh penghargaan adipura kirana dari kementerian negara lingkungan hidup.

3). Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya, dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain.

Kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Capaian Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama adalah sebagai berikut :



Grafik 3.16.

Capaian Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama di Kota Denpasar

Konflik karena faktor agama di Kota Denpasar dapat dikatakan tidak terjadi, mengingat karakter masyarakat kota Denpasar yang sebagian besar beragama Hindu cenderung adaptif dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016





lingkungannya disamping peran FKUB dalam meningkatkan silaturahmi antar umat beragama.

B. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 960.663.429.437,99 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 820.870.580.647,75 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,45%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016, komposisi belanja APBD Kota Denpasar, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2016		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1.087.829.312.089,28	1.029.213.190.220,06	55,63
2	Belanja Langsung	960.663.429.437,99	820.870.580.647,75	44,37
	Jumlah	2.048.492.741.527,27	1.850.083.770.867,81	90,31

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, 2016

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 55,63% dari realisasi belanja Kota Denpasar di tahun 2016 dan sisanya sebesar 44,37% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 781.963.521.759,99 atau 12,74% lebih tinggi dari rencana anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp.





693.568.527.805,99. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 adalah sebesar Rp. 601.053.485.267,19 atau 86,66%, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar
Per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	27.418.408.765,00	26.126.055.436,00	95,29
2	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	2.510.867.100,00	2.231.738.890,00	88,88
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	11.942.733.360,00	11.217.894.904,00	93,93
4	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	6.423.379.500,00	5.976.785.200,00	93,05
5	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Riil	5.694.460.880,00	5.215.802.815,00	91,59
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	7.631.449.250,00	7.106.338.852,00	93,12
7	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	41.555.236.700,00	38.855.531.850,00	93,50
8	Meningkatnya Infrastruktur	152.430.490.259,00	137.555.121.995,00	90,24
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	538.755.000,00	490.025.953,00	90,96
10	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	58.947.390.195,00	45.104.086.943,00	76,52
11	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.	21.293.988.027,00	17.097.987.125,00	80,29
12	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law	863.461.580,00	780.191.980,00	90,36



No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan			
13	Meningkatkannya Kesejahteraan Masyarakat	21.018.947.895,00	18.393.565.210,00	87,51
14	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	10.438.257.570,00	9.152.266.239,00	87,68
15	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	6.602.549.950,00	5.893.909.711,00	89,27
16	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan	152.117.593.144,99	131.778.812.998,19	86,63
17	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	77.812.140.170,00	61.772.662.177,00	79,39
18	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	7.313.658.050,00	5.800.083.530,00	79,30
19	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	28.836.786.440,00	25.526.150.695,00	88,52
20	Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	49.202.941.220,00	42.080.337.214,00	85,52
21	Meningkatkan Kerukunan Beragama	2.975.032.750,00	2.898.135.550,00	97,42
	Jumlah	693.568.527.805,99	601.053.485.267,19	86,66

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2016.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.5
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikatr	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
A	MISI 1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	3	96,45	26.126.055.436,00	95,29
2	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	1	45,00	2.231.738.890,00	88,88
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	109	11.217.894.904,00	93,93
B	MISI 2				
4	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	3	n/a	5.976.785.200,00	93,05
5	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Riil	3	102,00	5.215.802.815,00	91,59
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	2	n/a	7.106.338.852,00	93,12
7	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	n/a	38.855.531.850,00	93,50
8	Meningkatnya Infrastruktur	6	109,26	137.555.121.995,00	90,24
C	MISI 3				

No	Sasaran	Jumlah Indikatr	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	1	106,24	490.025.953,00	90,96
10	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	5	109,12	45.104.086.943,00	76,52
11	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.	1	180,00	17.097.987.125,00	80,29
12	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1	156,29	780.191.980,00	90,36
D	MISI 4				
13	Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	n/a	18.393.565.210,00	87,51
14	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	n/a	9.152.266.239,00	87,68
15	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	5	102,09	5.893.909.711,00	89,27
16	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan	4	592,00	131.778.812.998,19	86,63
17	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	13	97,37	61.772.662.177,00	79,39
18	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	2	n/a	5.800.083.530,00	79,30

No	Sasaran	Jumlah Indikatr	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
E	MISI 5				
19	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	2	n/a	25.526.150.695,00	88,52
20	Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	4	77,50	42.080.337.214,00	85,52
21	Meningkatkan Kerukunan Beragama	1	n/a	2.898.135.550,00	97,42

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

C. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 21 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% yaitu sebanyak 13 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
A	MISI 1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	3	96,45	95,29	1,15
2	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	1	45,00	88,88	-43,88
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	109	93,93	14,57
B	MISI 2				
4	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	3	n/a	93,05	-
5	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Riil	3	102,00	91,59	10,79
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	2	n/a	93,12	-
7	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	n/a	93,50	-
8	Meningkatnya Infrastruktur	6	109,26	90,24	19,02
C	MISI 3				
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	1	106,24	90,96	15,28
10	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	5	109,12	76,52	32,60
11	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan	1	180,00	80,29	99,71



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
	Denpasar sebagai Kota Cerdas.				
12	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1	156,29	90,36	65.93
D	MISI 4				
13	Meningkatkannya Kesejahteraan Masyarakat	1	n/a	87,51	-
14	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	n/a	87,68	-
15	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	5	102,09	89,27	12.82
16	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan	4	592,00	86,63	505.42
17	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	13	97,37	79,39	17.98
18	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	2	n/a	79,30	-
E	MISI 5				
19	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	2	n/a	88,52	-
20	Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	4	77,50	85,52	-8.20
21	Meningkatkan Kerukunan Beragama	1	n/a	97,42	-

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 62 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada tahun 2016, sebagai berikut :

- 19 indikator atau 30,65% melebihi target dengan kategori sangat baik,
- 22 indikator atau 35,48% sesuai target dengan kategori baik,
- 4 Indikator atau 6,45% tidak mencapai target dengan rincian :
 - 2 indikator atau 3,23% tidak mencapai target dengan kategori cukup,
 - 2 indikator atau 3,23% tidak mencapai target dengan kategori kurang
- 17 indikator atau 27,42% indikator tidak tersedia data.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Denpasar menetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 21 (duapuluh satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai.





Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran (100%) telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 96,45%, tidak mencapai target dengan interpretasi Baik
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 45,00%, tidak mencapai target dengan interpretasi Kurang.
3. Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,67%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator tidak tersedia data mengingat penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis.
5. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 128,17%. Melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
6. Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator tidak tersedia data mengingat penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis.
7. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator, namun pada tahun 2016 pelaksanaannya baru pada tahap perencanaan sehingga belum dapat dihitung.
8. Sasaran 8 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 73,44%, mencapai target dengan interpretasi Cukup
9. Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,24%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
10. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 109,12%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
11. Sasaran 11 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 180,00%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.





12. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 156,29%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
13. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator, tidak tersedia data mengingat penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis.
14. Sasaran 14 terdiri dari 2 indikator, tidak tersedia data mengingat penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis.
15. Sasaran 15 terdiri dari 5 indikator, dengan nilai 102,09%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
16. Sasaran 16 terdiri dari 4 indikator, dengan nilai 592,05%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik.
17. Sasaran 17 terdiri dari 13 indikator, dengan nilai 97,37%, mencapai target dengan interpretasi Baik.
18. Sasaran 18 terdiri dari 3 indikator, dengan nilai 119,66%, melampaui target dengan interpretasi Sangat Baik.
19. Sasaran 19 terdiri dari 2 indikator, dengan nilai 100,00%, mencapai target dengan interpretasi Baik
20. Sasaran 20 terdiri dari 6 indikator, dengan nilai 87,17% mencapai target dengan interpretasi Baik.
21. Sasaran 21 terdiri dari 1 indikator, dengan nilai 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2016 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Perubahan Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan





ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.

Denpasar, Maret 2017
WALIKOTA DENPASAR

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA





Pemerintah Kota Denpasar

LAMPIRAN



Pemerintah Kota Denpasar

Lampiran 1. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1)	Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan	%	100	99	98,59	1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3.701.100.565,00	3.435.020.500,00	92,81
		2)	Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana	Indeks	-	-	-	2	Program Pengembangan Nilai Budaya	23.717.308.200,00	22.691.034.936,00	98,73
		3)	Persentase LPD Sehat	%	100	94,3	94,30					
		Rata-rata capaian dari 3 indikator						96,45	Total per Sasaran	27.418.408.765,00	26.126.055.436,00	95,29
2	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	1)	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	9	20	45,00	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.515.165.000,00	1.279.826.990,00	84,46
								2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	146.820.000,00	133.470.000,00	90,90
								3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	259.000.000,00	254.417.000,00	98,23
								4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	589.882.100,00	564.024.900,00	95,80

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Rata-rata capaian dari 1 indikator				45,00	Total per Sasaran	2.510.867.100,00	2.231.738.890,00	88,88		
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1)	Jumlah peran serta sekaan kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah	Sekaa	100	117	117	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	451.213.930,00	436.899.050,00	96,82
		2)	Jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas budaya	Sanggar	44	44	100	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.694.438.080,00	1.223.886.900,00	72,22
		3)	Jumlah STT yang mengikuti festival ogoh ogoh	STT	360	360	100	3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	9.797.081.350,00	9.557.108.954,00	96,78
		Rata-rata capaian dari 3 indikator					105,67	Total per Sasaran	11.942.733.360,00	11.217.894.904,00	93,93	
4	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	1)	Berkurangnya penduduk miskin	%	2,00	-	-	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	227.392.800,00	223.525.050,00	98,29
		2)	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00	-	-	2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	94.149.000,00	78.966.100,00	83,87
								3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	285.682.000,00	275.092.400,00	96,29

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	694.274.250,00	665.613.250,00	95,87
							5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	411.387.700,00	400.690.100,00	97,39
							6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.395.941.650,00	1.350.292.000,00	96,72
							7	Program Keluarga Harapan	94.960.000,00	85.947.100,00	90,50
							8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	220.746.700,00	208.854.600,00	94,61
							9	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	497.491.400,00	455.617.400,00	91,58
							10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	698.433.400,00	611.432.600,00	87,54
							11	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	101.646.000,00	100.681.000,00	99,05

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	272.283.300,00	265.001.300,00	97,32
							13	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	184.876.000,00	152.812.000,00	82,65
							14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	264.981.000,00	256.776.000,00	96,90
							15	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	218.595.000,00	191.195.000,00	87,46
							16	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	376.230.000,00	328.515.000,00	87,31
							17	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	151.512.500,00	102.027.500,00	67,33
							18	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	232.796.800,00	223.746.800,00	96,11
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				0	Total per Sasaran	6.423.379.500,00	5.976.785.200,00	93,05	
5	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	1) Persentase peningkatan penerbitan ijin usaha Kecil	%	5,00	7,75	155	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	432.857.600,00	416.668.800,00	96,26

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat	Unit	150	152	101	2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	609.740.200,00	529.990.564,00	86,92
							3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	279.974.000,00	221.608.700,00	79,15
							4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.349.333.600,00	1.228.614.350,00	91,05
							5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2.465.594.630,00	2.279.812.591,00	92,46
							6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	101.535.100,00	90.484.200,00	89,11
							7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	455.425.750,00	448.623.610,00	98,50
							Rata-rata capaian dari 2 indikator			
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	1) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97	-	-	1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41.300.000,00	41.300.000,00	100,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59	-	-	2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.061.054.500,00	1.030.431.560,00	97,46
							3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	23.125.000,00	22.625.000,00	96,84
							4) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	6.423.044.750,00	5.934.107.192,00	72,75
							5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	82.925.000,00	77.875.100,00	93,91
		Rata-rata capaian dari 2 indikator						0	Total per Sasaran	7.631.449.250,00
7	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1) Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	%	-	-	-	1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4.817.094.500,00	3.522.754.000,00	73,13
							2) Program Pengembangan Perumahan	946.645.300,00	903.274.700,00	95,41
		Rata-rata capaian dari 1 indikator						0	Total per Sasaran	5.763.739.800,00
8	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	1) Berkurangnya Titik Genangan	Lokasi	6	6	100,00	1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	78.030.449.000,00	73.031.335.240,00	93,59
		2) Meningkatnya Persentase Rumah Tangga terlayani ipal skala kawasan dan skala kota	%	7,09	7,10	100,14	2) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	14.847.306.740,00	11.780.301.700,00	79,34

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3) Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Layanan PDAM	%	48,96	45,84	93,63	3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.934.133.900,00	5.526.429.400,00	79,69
		4) Menurunnya Persentase jumlah kecelakaan lalu lintas	%	10			4 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	412.396.000,00	407.704.000,00	98,86
							5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.807.597.220,00	6.524.274.842,00	95,83
							6 Program Pengendalian Banjir	2.448.108.000,00	2.046.513.000,00	83,59
							7 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	25.471.894.042,00	22.050.292.290,00	86,56
							8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.391.787.260,00	4.228.320.250,00	96,27
							9 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5.110.787.920,00	4.417.098.833,00	86,42
							10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.125.498.230,00	3.022.262.700,00	96,69
							11 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.312.561.140,00	1.276.858.600,00	97,27

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							12	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1.106.628.000,00	959.876.040,00	86,73
							13	Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	301.189.180,00	277.483.200,00	92,12
							14	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	552.570.400,00	522.111.400,00	97,87
							18	Program Lingkungan Sehat Perumahan	45.772.000,00	45.722.000,00	99,89
							19	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pemukiman	1.531.811.227,00	1.438.538.500,00	95,40
							Rata-rata capaian dari 4 indikator				
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	1) Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	80,00	84,99	106,24	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.985.000,00	2.114.400,00	30,27
							2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	531.770.000,00	487.911.553,00	91,75
							Rata-rata capaian dari 1 indikator				
10	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan	1) Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Katagori	WTP	-	-	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	27.486.500,00	24.187.050,00	87,99

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	terpercaya	2) Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	70,01	-	-	2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.581.953.750,00	2.060.004.122,00	79,78
		3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	nilai	4,4025	-	-	3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.897.603.975,00	3.074.746.631,00	78,88
		4) Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	81,00	88,39	109,12	4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	567.918.570,00	467.220.700,00	82,26
							5) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	446.687.500,00	406.795.000,00	91,06
							6) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.702.502.000,00	2.594.290.240,00	95,99
							7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	278.154.250,00	233.455.800,00	83,93
							8) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	421.250.000,00	218.221.264,00	51,80
							9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.025.000,00	38.975.000,00	67,16
							10) Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	168.969.800,00	104.819.100,00	62,03

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							11	Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	90.652.750,00	66.064.700,00	72,87
							12	Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	422.090.000,00	342.192.700,00	81,07
							13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	39.379.593.400,00	28.026.516.824,00	71,17
							14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.136.983.200,00	5.732.297.118,00	93,40
							15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.545.299.500,00	1.506.428.700,00	97,48
							16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	120.544.000,00	107.269.000,00	88,98
							17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	101.676.000,00	100.602.994,00	98,94
								Rata-rata capaian dari 4 indikator			109,12
								Total per Sasaran	58.947.390.195,00	45.104.086.943,00	76,5158
11	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan	1) Peningkatan jumlah aplikasi pemerintah yang terintegrasi dalam mewujudkan pusat data	Aplikasi	5	9	180,00	1	Program Pengembangan Data/Informasi	876.653.000,00	650.498.440,00	74,20

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.						2	Program Kerjasama Pembangunan	1.339.565.000,00	1.252.116.887,00	93,47
							3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	987.562.603,00	764.121.669,00	77,37
							4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	448.285.000,00	377.936.494,00	84,30
							5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.490.979.000,00	1.209.751.962,00	81,13
							6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	421.267.000,00	372.600.450,00	88,44
							7	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.041.500.000,00		
							8	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	887.156.000,00	721.729.318,00	81,35
							9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	13.526.355.424,00	11.538.780.305,00	85,30

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							10	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	180.000.000,00	130.396.200,00	72,44
							11	Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	94.665.000,00	80.055.400,00	84,56
		Rata-rata capaian dari 1 indikator				180,00	Total per Sasaran	21.293.988.027,00	17.097.987.125,00	80,29	
12	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (<i>Law Enforcement</i>) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1) Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda	Pelanggaran	3,265	2,089	156,29	1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak	578.060.580,00	508.490.980,00	87,96
							2	Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban	285.401.000,00	271.701.000,00	95,19
		Rata-rata capaian dari 1 indikator				156,29	Total per Sasaran	863.461.580,00	780.191.980,00	90,36	
13	Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1) Indek Pembangunan Manusia	Indeks	83,01	-	-	1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	7.770.963.295,00	6.356.014.310,00	81,79
							2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3.223.717.000,00	3.176.873.500,00	98,54
							3	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	700.000.000,00	410.474.500,00	58,63
							4	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	3.614.710.000,00	3.307.189.300,00	91,49

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan						
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							5	Program Keluarga Berencana	226.090.000,00	198.679.600,00	87,87		
							6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	424.577.000,00	330.612.000,00	77,86		
							7	Program Pelayanan Kontrasepsi	154.130.800,00	152.800.800,00	99,13		
							8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	522.966.400,00	362.137.600,00	69,24		
							9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	326.895.000,00	322.003.100,00	98,50		
							10	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	179.610.000,00	176.581.300,00	98,31		
							11	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	198.400.400,00	172.960.500,00	87,17		
							12	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	170.230.000,00	169.013.100,00	99,28		
							13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3.506.658.000,00	3.258.225.600,00	96,39		
								Rata-rata capaian dari 1 indikator	-	Total per Sasaran	21.018.947.895,00	18.393.565.210,00	87,51

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	1) Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	11,77	-	-	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	569.562.000,00	422.291.499,00	73,32
		2) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	13,17	-	-	2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	157.120.000,00	122.088.800,00	73,10
							3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	255.145.070,00	242.083.600,00	94,88
							4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.263.247.750,00	4.739.999.340,00	99,66
							5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	192.165.000,00	150.671.000,00	78,40
							6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	406.193.000,00	320.905.500,00	79,00
							7 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	671.189.200,00	470.223.000,00	70,05
							8 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	718.932.500,00	590.705.150,00	82,16
							9 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	1.094.937.000,00	1.056.662.400,00	96,50

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	455.991.500,00	445.213.000,00	97,63	
							11	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	604.413.550,00	542.101.950,00	89,69	
							12	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	49.361.000,00	49.321.000,00	99,91	
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				0	Total per Sasaran		10.438.257.570,00	9.152.266.239,00	87,68	
15	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	1)	Produktivitas padi	ton	66,55	66,51	99,94	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	2.283.116.250,00	1.972.016.332,00	47,07
		2)	Produk olahan hasil perikanan	ton	1.422,20	1.561,60	109,80	2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	429.441.250,00	403.107.150,00	93,86
		3)	Konsumsi Ikan	(Kg/Kpt/Th)	33,98	34,1	100,35	3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	849.579.500,00	682.384.254,00	94,35
		4)	Produk olahan hasil peternakan	ton	198,86	217,5	109,37	4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	304.853.500,00	289.433.500,00	94,94

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5) Konsumsi Protein Hewani	(Kg/Kpt/Th)	16,77	15	91,00	5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	531.388.500,00	509.478.625,00	95,87
							7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	410.899.000,00	400.949.500,00	97,57
							8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	649.433.000,00	622.806.750,00	95,90
							9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	138.159.500,00	121.034.150,00	87,60
							10) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani	868.902.450,00	773.431.050,00	89,01
							11) Program Perencanaan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan	136.777.000,00	119.268.400,00	87,19
							Rata-rata capaian dari 5 indikator			
16	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan	1) Angka Harapan Hidup	Tahun	74,05	-	-	1) Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.969.595.202,00	2.150.025.327,00	72,40
		2) Menurunkan Angka Kematian Bayi	orang /1.000 KH	15	1	1.500	2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.159.254.500,00	5.878.547.415,00	82,11
		3) Menurunkan Angka kematian ibu melahirkan	orang /100.000 KH	100	48	208,33	3) Program Pengawasan Obat dan Makanan	27.410.000,00	27.383.350,00	99,90

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4) Menurunkan Angka Kesakitan DBD	orang /100.000 or	215	317	67,82	4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	81.604.500,00	80.884.500,00	99,11
							5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.103.591.850,00	2.977.038.685,00	95,92
							6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	507.744.300,00	404.202.350,00	79,60
							7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	19.326.575.947,00	16.505.706.543,00	85,40
							8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.349.109.600,00	946.984.109,00	70,19
							9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	6.400.000,00	3.200.000,00	50,00
							10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	26.256.400,00	26.129.700,00	99,51
							11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	8.832.429.894,00	4.995.204.849,44	56,55
							12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	693.344.000,00	387.037.256,00	55,82

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	265.968.300,00	249.275.200,00	93,72
							14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	982.533.000,00	831.570.350,00	84,63
							15 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	105.376.883.451,99	95.187.981.663,75	90,33
							16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	493.032.900,00	352.142.700,00	58,95
							17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	490.209.500,00	397.040.200,00	90,61
							18 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	74.947.500,00	73.347.500,00	97,86
							19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	350.702.300,00	305.111.300,00	94,05
							Rata-rata capaian dari 4 indikator			
17	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1) Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	95,12	97,96	102,99	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	994.927.540,00	844.505.580,00	84,88
		2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105,00	100,69	95,90	2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	52.717.094.224,00	42.469.110.977,00	80,56
		3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	105,00	107,50	97,67	3 Program Pendidikan Menengah	5.110.105.730,00	4.200.952.010,00	82,20

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	105,00	104,84	99,85	4) Program Pendidikan Non Formal	1.209.348.956,00	962.398.366,00	79,57
		5) Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,82	89,43	97,40	5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.022.238.300,00	1.892.432.890,00	47,04
		6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,83	79,97	100,18	6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-		
		7) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,01	73,94	104,13	7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10.605.727.420,00	8.489.671.604,00	80,04
		8) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	103,13	90,87	88,11	8) Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar	3.152.698.000,00	2.913.590.750,00	92,41
		9) Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	110,22	81,97	74,37				
		10) Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	%	70,20	74,05	105,48				
		11) Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	%	100,00	99,73	99,73				
		12) Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00				
		13) Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00				
		Rata-rata capaian dari 13 indikator				97,37	Total per Sasaran	77.812.140.170,00	61.772.662.177,00	79,39
18	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	1) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	522.679	625.431	119,66	1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.900.605.550,00	1.866.005.100,00	41,99

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3,25	-	-	2) Program Pengembangan Kemitraan	2.738.274.000,00	2.296.435.920,00	83,06
		3) Meningkatkan "Spend of Money"	Rp.	-	-	-	4) Program Pengembangan Destinasi Kepariwisata	1.674.778.500,00	1.637.642.510,00	97,78
		Rata-rata capaian dari 3 indikator				119,66	Total per Sasaran	7.313.658.050,00	5.800.083.530,00	79,30
19	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	1) Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	30,00	30	100,00	1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.451.249.000,00	1.410.492.000,00	97,19
		2) Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Taman	Indeks	-	-	-	2) Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan	27.385.537.440,00	24.115.658.695,00	88,00
							3) Program Pemanfaatan Ruang	33.109.468.900,00	31.852.241.550,00	96,20
							4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.682.028.000,00	2.577.261.600,00	96,09
		Rata-rata capaian dari 2 indikator				100,00	Total per Sasaran	64.628.283.340,00	59.955.653.845,00	92,77
20	Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	1) Meningkatnya jumlah bank sampah	%	10	11,3	113,00	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.870.796.980,00	1.313.930.504,00	70,23
		2) Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100,00	100,00	100,00	2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	650.831.450,00	611.806.900,00	94,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan						
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		3)	Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu	%	100,00	100,00	100,00	3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	344.638.440,00	297.419.650,00	86,29		
		4)	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah	2	1	50,00	4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	294.114.400,00	255.753.900,00	86,95		
		5)	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah	5	3	60,00	5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi	667.360.800,00	565.199.700,00	84,69		
		6)	Adipura Kirana	Trophy	1	1	100,00	6) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	107.455.000,00	101.269.000,00	94,24		
								7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	44.879.046.650,00	38.572.045.060,00	85,94		
								8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	336.994.500,00	313.759.500,00	93,10		
								9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	51.703.000,00	49.153.000,00	89,08		
		Rata-rata capaian dari 6 indikator						87,17	Total per Sasaran	49.202.941.220,00	42.080.337.214,00	85,52	
		21	Meningkatkan Kerukunan Beragama	1)	Jumlah Konflik agama	Kejadian	0	0	100,00	1) Program Pengembangan Wawasan	2.832.782.750,00	2.756.585.550,00	96,03

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	142.250.000,00	141.550.000,00	99,50
		Rata-rata capaian dari 1 indikator				100,00	Total per Sasaran	2.975.032.750,00	2.898.135.550,00	97,42



WALIKOTA DENPASAR

Jl. Gajah Mada Nomor 1 Denpasar Telepon (0361) 221530

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IB. Rai Dharmawijaya Mantra

Jabatan : Walikota Denpasar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 24 Pebruari 2016

Walikota Denpasar



PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2016
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan	%	100
		2	Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karana	Indeks	-
		3	Persentase LPD Sehat	%	100
2	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	4	Menurunnya Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	9
3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	5	Jumlah peran serta sekaan kesenian yang terlibat dalam penyelenggaraan festival budaya daerah	Sekaa	100
		6	Jumlah sanggar tari yang mengikuti pentas budaya	Sanggar	44
		7	Jumlah STT yang mengikuti festival ogoh ogoh	STT	360
4	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	8	Berkurangnya penduduk miskin	%	2,00
		9	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,00

5	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	10	Persentase peningkatan penerbitan ijin usaha Kecil	%	5,00
		11	Meningkatnya Jumlah Koperasi yang sehat	Unit	150
6	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	12	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97
		13	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59
7	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	14	Menurunnya Luasan Permukiman Kumuh	%	-
8	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	15	Berkurangnya Titik Genangan	Lokasi	6
		16	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga terlayani ipal skala kawasan dan skala kota	%	7,09
		17	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Layanan PDAM	%	48,96
		18	Menurunnya Persentase jumlah kecelakaan lalu lintas	%	10
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	19	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	80,00
10	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	20	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Katagori	WTP
		21	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	70,01

		22	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	nilai	4,4025
		23	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	81,00
11	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.	24	Peningkatan jumlah aplikasi pemerintah yang terintegrasi dalam mewujudkan pusat data	Aplikasi	5
12	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	25	Penurunan angka pelanggaran terhadap Perda	Pelanggaran	3,265
13	Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat	26	Indek Pembangunan Manusia	Indeks	83,01
14	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	27	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	11,77
		28	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	13,17
15	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	29	Produktivitas padi	ton	66,55
		30	Produk olahan hasil perikanan	ton	1.422,20
		31	Konsumsi Ikan	(Kg/Kpt/Th)	33,98
		32	Produk olahan hasil peternakan	ton	198,86
		33	Konsumsi Protein Hewani	(Kg/Kpt/Th)	16,77
16	Meningkatkan aksesibilitas dan	34	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,05

	kualitas Kesehatan	35	Menurunkan Angka Kematian Bayi	orang/ 1.000 KH	15
		36	Menurunkan Angka kematian ibu melahirkan	orang/ 100.000 KH	100
		37	Menurunkan Angka Kesakitan DBD	orang/ 100.000 or	215
17	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	38	Persentase penduduk usia>15 tahun melek huruf	%	95,12
		39	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	105,00
		40	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	105,00
		41	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA	%	105,00
		42	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	91,82
		43	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	79,83
		44	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,01
		45	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	%	103,13
		46	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	%	110,22
		47	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	%	70,20
		48	Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	%	100,00
		49	Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	%	100,00
		50	Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	%	100,00
18	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	51	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	522.679
		52	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3,25
		53	Meningkatkan "Spend of Money"	Rp.	-



19	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	54	Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	30,00
		55	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Taman	Indeks	-
20	Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	56	Meningkatnya jumlah bank sampah	%	10
		57	Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100,00
		58	Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang memenuhi baku mutu	%	100,00
		59	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Mandiri	Sekolah	2
		60	Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional	Sekolah	5
21	Meningkatkan Kerukunan Beragama	61	Adipura Kirana	Trophy	1
		62	Jumlah Konflik agama	Kejadian	0

Wali Kota Denpasar

IB. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA





PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

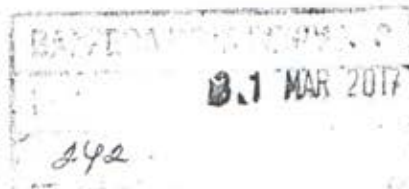
Jalan Menuh Nomor : 8 Telp. (0361) 234876 Fax. (0361)227160 Denpasar

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Denpasar, 31 Maret 2017

Inspektur Kota Denpasar


Ida Bagus Gde Sidharta, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

19640223 199203 1 009



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor. 8 Telp. (0361) 234876 Fax. 0361 (227160) Denpasar

Denpasar, 31 Maret 2017

Kepada:

Nomor : 700 / 268 / Itko

Yth. Walikota Denpasar

Lampiran : 1 (satu) set

di -

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Denpasar
TA. 2016

Denpasar

Dengan ini kami sampaikan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 berupa: Format Laporan, Mekanisme Penyusunan Laporan, dan Substansi Laporan Kinerja.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan hasil sebagai berikut:

I. Dasar Reviu

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Keputusan Inspektur Kota Denpasar Nomor: 700 / 192.b / Itko Tentang Pedoman Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016.

- 4) Surat Tugas Inspektur Kota Denpasar Nomor: 700/104/Itko tanggal 8 Maret 2017.

II. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

III. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan reviu:

- a. Pengumpulan data/informasi.
- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas.
- c. Penyusunan Kertas Kerja Reviu.
- d. Membuat Surat Pernyataan Telah Direviu.
- e. Reviu dilakukan hanya atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar saja.

V. Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Denpasar Nomor: 700/104/Itko tanggal 8 Maret 2017, Reviu Laporan Kinerja (LKj) ini dilaksanakan terhadap Format Laporan Kinerja, Mekanisme Penyusunan Laporan dan Substansi Laporan Kinerja. Adapun simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

A. Format Laporan Kinerja

1. Laporan Kinerja (LKj) Telah Menampilkan Data Penting Instansi Pemerintah ✓

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah menyajikan data penting instansi pemerintah diantaranya : Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja.

2. LKj Telah Menyajikan Informasi Target Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah menyajikan informasi target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Namun dalam Bab II LKj belum dijelaskan tentang target kinerja, yang dijelaskan adalah tujuan, sasaran dan anggaran kinerja. Target kinerja tersebut merupakan target yang telah diperjanjkan oleh Walikota Denpasar untuk tahun anggaran 2016.

Atas hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak penyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar dan direkomendasikan agar dilakukan perbaikan pada Bab II tentang Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

3. LKj Telah Menyajikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah Secara Memadai.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah secara memadai. Bab III Laporan Kinerja telah menyajikan uraian capaian kinerja per tujuan/sasaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016. Disamping itu untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dan indikator sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Dari 21

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar, dalam Bab IV belum menyajikan upaya – upaya perbaikan capaian indikator kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan.

6. LKj Telah Menyajikan Akuntabilitas Keuangan

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah menyajikan akuntabilitas keuangan dan Analisa Efisiensi. Bab III Laporan Kinerja telah menyajikan jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan persentase pencapaian. Dan sudah seluruh indikator/sasaran kinerja menyajikan jumlah anggaran dan realisasi anggaran yang diperlukan.

B. Mekanisme Penyusunan Laporan

1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sesuai dengan Berita Acara Nomor 06/061.1/Org Serah Terima Tugas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 yaitu serah terima tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Bagian Organisasi Sekretariat Kota Denpasar yang selanjutnya disebut pihak pertama (I) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang selanjutnya disebut pihak kedua (II) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut yaitu :

- 1) Desak Nyoman Widiasih, SH, NIP.19631231 199203 2 007, Pangkat pembina Tk I selaku Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2) Drs. Ida Bagus Subrata, MM. NIP.19591231 198610 1 029, Pangkat Pembina Utama Muda selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Menyepakati :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Denpasar akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
 - 2) Segala bentuk pembiayaan sebagai akibat kegiatan penyusunan LKIP Kota Denpasar dianggarkan pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
- 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.**

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar belum sepenuhnya didukung dengan data yang memadai, dimana dalam Bab II LKj telah menyajikan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar, namun pada perjanjian kinerja 2016 Pemerintah Kota Denpasar belum menyajikan data berbasis kinerja namun masih berbasis anggaran. Perjanjian kinerja Tahun 2016 pada badan Laporan Kinerja (LKj) IP tidak diuraikan secara rinci per sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Namun Perjanjian Kinerja hanya diuraikan per tujuan/sasaran dengan target anggaran (masih berbasis anggaran). Dalam Perjanjian Kinerja yang diuraikan pada badan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah hanya diuraikan sebanyak 5 (lima) tujuan/sasaran yang dilengkapi dengan jumlah anggaran per tujuan/sasaran. Sehingga terdapat ketidaksinkronan antara Perjanjian Kinerja pada badan dan lampiran Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah menguraikan per sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja. Namun sasaran strategis yang diuraikan pada lampiran perjanjian kinerja sebanyak 21 sasaran strategis. Sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidaksinkronan antara badan dan lampiran Perjanjian Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Bab II LKj telah menyajikan uraian per tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang sesuai dengan visi dan misi kota Denpasar sesuai dengan RPJMD. Pada Bab II Lkj telah menyajikan 5 tujuan dan 20 sasaran startegis dengan dilengkapi indikator kinerja per sasaran. Namun berdasarkan data tersebut terdapat indikator kinerja yang masih belum memenuhi kriteria SMART seperti contoh untuk sasaran mengentaskan kemiskinan dan pengangguran indikator kinerja yang dibuat adalah angka kemiskinan, prevelansi gizi buruk pada balita, dan angka pengangguran. Sehingga berdasarkan contoh indikator kinerja per sasaran tersebut belum sepenuhnya memadai karena tidak memenuhi kriteria SMART.

Pada Bab III Laporan Kinerja telah menyajikan uraian capaian kinerja per tujuan/sasaran organisasi dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada Bab III diuraikan sebanyak 5 tujuan, 21 sasaran strategis dan indikator kinerja. Setiap indikator kinerja telah menyajikan data kinerja berupa target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Capaian kinerja sudah diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016. Terdapat ketidaksinkronan antara uraian sasaran strategis yang diuraikan pada Bab II Laporan Kinerja dan Bab III Laporan Kinerja. Dimana pada Bab II diuraikan sebanyak 20 sasaran strategis sedangkan Bab III diuraikan sebanyak 21 sasaran strategis. Pada Bab II yaitu tujuan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditetapkan 4 sasaran strategis yaitu mngentaskan kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya perkembangan ekonomi riil, meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, dan mengurangi permukiman kumuh perkotaan. Sedangkan pada Bab III Laporan Kinerja yaitu tujuan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditetapkan 5 sasaran strategis yaitu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat kecil, meningkatnya pengarusutamaan

gender dan perlindungan anak, mengurangi permukiman kumuh perkotaan, dan meningkatnya infrastruktur.

Lampiran LKj telah melampirkan Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dan Realisasi Anggaran per sasaran terkait capaian indikator kinerja tahun 2016. Namun belum menyajikan Pengukuran Kinerja Kota Denpasar Tahun 2016.

Direkomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar agar dalam menyusun LKj IP Kota Denpasar untuk badan pada Bab II menguraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 berbasis kinerja dan bukan berbasis anggaran. Bappeda juga harus mensinkronkan antara Perjanjian kinerja pada badan laporan Kinerja dengan Perjanjian Kinerja pada lampiran Laporan Kinerja. Selain itu pada Bab II LKj IP agar menguraikan indikator kinerja per sasaran yang memenuhi kriteria SMART. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Denpasar agar mensinkronkan sasaran startegis yang ditetapkan pada Bab II dengan Bab III Laporan Kinerja, dan membuat lampiran pengukuran kinerja Tahun 2016.

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan mekanisme penyampaian data dan informasi yang memadai dimana terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi tentang pengumpulan data kinerja yang up to date, ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas waktu penyampaiannya dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar dimana tanggung jawabnya antara lain berada pada Sub Bagian Perencanaan yang diantaranya mempunyai tugas : "Menyiapkan bahan dan merumuskan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program kerja" dan pada Sub Bagian Program yang diantaranya mempunyai tugas : "Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban kinerja".

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar, data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya, diantaranya datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten.

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar, analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja telah diuraikan terkait capaian kinerja pemerintah kota Denpasar, Akuntabilitas Keuangan, dan Analisa Efisiensi. Pada poin capaian kinerja pemerintah kota Denpasar telah disajikan pula capaian kinerja per tujuan/sasaran organisasi dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja per

sasaran. Data kinerja masing masing sasaran strategis berikut indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja serta uraian penjelasannya yang bersumber dari masing – masing unit kerja. Demikian juga untuk akuntabilitas keuangan per sasaran strategis telah diuraikan rencana dan realisasi anggaran yang bersumber dari masing-masing unit kerja.

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya

Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 namun berdasarkan hasil konfirmasi secara lisan kepada petugas yang menangani pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar memang belum menyusun LKj IP bulanan yang merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

Direkomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar agar menyusun LKj IP bulanan yang merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

C. Substansi Laporan Kinerja

1. Tujuan/sasaran dalam LKj Telah Sesuai Dengan Tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

Hasil Reviu atas LKj diketahui bahwa terdapat 5 tujuan dengan 21 sasaran. Semua sasaran dalam LKj telah sesuai dengan sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

2. Tujuan/sasaran dalam LKj Telah Selaras Dengan Rencana Strategi.

Hasil Reviu atas LKj dan RPJMD ditemukan bahwa dalam Rencana Strategis (RPJMD) tidak memuat sasaran kinerja yang tertuang di LKj. LKj telah menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja.

Terhadap hal tersebut telah diklarifikasi dengan pihak penyusun LKj Kota Denpasar dan akan dilakukan koreksi atas hal tersebut.

3. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Dalam LKj Telah Sesuai Dengan Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Dalam Perjanjian Kinerja.

Hasil Reviu atas LKj ditemukan bahwa:

- a) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- b) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- c) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- d) Target indikator kinerja pada sasaran dalam Perjanjian Kinerja "Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran" tidak disajikan dalam LKj antara lain:
 - a. Berkurangnya penduduk miskin dengan target 2,00%.
 - b. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan target 3,00%.
- e) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat kecil di Kota Denpasar" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- f) Target indikator kinerja pada sasaran dalam Perjanjian Kinerja "Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak" tidak disajikan dalam LKj antara lain:
 - a. Meningkatnya indeks pembangunan gender dengan target 97 indeks.
 - b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender dengan target 59 indeks.

- g) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur" belum sesuai dengan target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:
- a. Indikator di LKj "meningkatnya persentase dalam kondisi baik" dengan target 65% tidak terdapat di PK.
 - b. Indikator di LKj "persentase berkurangnya kecelakaan lalu lintas" dengan target 20 kecelakaan berbeda dengan indikator di PK "menurunnya persentase jumlah kecelakaan lalu lintas" dengan target 10%.
- h) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- i) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- j) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatnya kepercayaan publik dengan mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- k) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) dalam Tata Kelola Pemerintahan" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
- l) Target indikator kinerja pada sasaran dalam Perjanjian Kinerja "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pembangunan Manusia" dengan target 83,01 indeks tidak disajikan dalam LKj.
- m) Target indikator kinerja pada sasaran dalam Perjanjian Kinerja "Berkembangnya industri Pengolahan dan Perdagangan" tidak disajikan dalam LKj antara lain:
- a. Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB dengan target 11,77%.

- b. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dengan target 13,17%.
- n) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Berkembangnya sektor pertanian dan ketersediaan pangan" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - o) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - p) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - q) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatkan pariwisata berbasis budaya" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - r) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - s) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Mengurangi Degradasi lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.
 - t) Target indikator kinerja pada sasaran dalam LKj "Meningkatkan kerukunan beragama" telah sesuai target Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.

Hasil Reviu atas LKj diketahui bahwa tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

7. Telah Terdapat Perbandingan Data Kinerja Dengan Tahun Lalu, Standar Nasional Dan Sebagainya Yang Bermanfaat

Pada Bab III LKj Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan Pengukuran Capaian Kinerja. Sebagian besar LKj telah menguraikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, sebagian telah sesuai dengan standar nasional dan telah menguraikan kendala yang dihadapi dan upaya untuk meningkatkan kinerja. Namun terdapat beberapa sasaran / indikator kinerja yang tidak menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan perbandingan data kinerja belum cukup memadai karena dalam perbandingan data kinerja belum seluruhnya memuat perbandingan antara :

- Target vs Realisasi
- Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya
- Realisasi sampai dg tahun berjalan vs target jangka menengah
- Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN
- Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yg setara atau sekelas

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.

IKU dan IK telah cukup untuk mengukur tujuan sasaran. IKU dan IK sudah terkait langsung dengan sasaran atau kondisi yg akan diukur, sudah mewakili (representatif) sasaran/kondisi yg akan diwujudkan, indikator mengindikasikan /mencerminkan terwujudnya kinerja atau sasaran strategis yg ditetapkan

9. IKU dan IK telah SMART


Sebagian IKU dan IK telah menunjukkan kriteria SMART yaitu memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Namun pada beberapa IKU dan IK belum menggambarkan kurun waktu tertentu.

VI. Tindak Lanjut Hasil Reviu

Segala permasalahan yang dapat diungkap berdasarkan hasil reviu kami agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai penyusun LKj Pemerintah Kota Denpasar segera untuk menindaklanjutinya.

Demikian Laporan Hasil Reviu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dalam penyusunan LKj IP Kota Denpasar.

Inspektur Kota Denpasar,


Ida Bagus Gde Sidartha, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199203 1 009

Tembusan : Yth.

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
2. Arsip

sasaran yang telah ditetapkan, sebanyak 9 sasaran dinyatakan " Baik Sekali", 6 sasaran dinyatakan "Baik", 5 sasaran dinyatakan "Cukup" dan 1 sasaran dinyatakan "kurang". Terhadap capaian sasaran yang dinyatakan kurang tersebut pada tahun 2016 diasumsikan jumlahnya sama dengan tahun 2015, namun terjadi peningkatan jumlah konflik di Kota Denpasar pada tahun 2016 yang semula 9 konflik menjadi 20 konflik sosial sehingga capaian kinerja hanya 45%.

4. LKj Telah Menyajikan dengan Lampiran yang Mendukung Informasi pada Badan Laporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Denpasar telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. Lampiran-lampiran yang disajikan dalam LKj yang mendukung informasi badan laporan, yaitu : Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016, Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2016. LKj sudah menyajikan Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar, Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Namun LKj belum menyajikan Pengukuran Kinerja Kota Denpasar Tahun 2016.

Direkomendasikan kepada Bappeda Kota Denpasar agar segera melengkapi Lkj dengan lampiran Pengukuran Kinerja yang mendukung Informasi pada Badan Laporan.

5. LKj Telah Menyajikan Upaya Perbaikan kedepan

Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 diukur melalui pencapaian 21 (dua puluh satu) sasaran dengan didukung oleh 62 (enam puluh dua) indikator. Namun masih ada 1(satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target dengan interpretasi kurang sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya.

**Lampiran 4. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KOTA DENPASAR
TAHUN 2016**

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pangripta Nusantara (Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik).	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta	<p>Kota Denpasar mendapat penghargaan “Pangripta Nusantara” peringkat terbaik kedua dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). - Penghargaan tersebut diberikan setelah daerah-daerah itu dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan lewat penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). - “Lewat pemberian penghargaan ini diharapkan pemerintah daerah terus terpacu. Sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas pembangunan yang ada,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). - Penghargaan yang diserahkan Bambang P.S. Brodjonegoro diterima langsung oleh Bapak Walikota Denpasar.</p> <p>Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan menggunakan dua belas parameter, yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, proses perencanaan dari bawah (bottom up), proses perencanaan dari atas (top down), proses perencanaan teknokratik, proses perencanaan politik, inovasi proses dan program daerah, tampilan dan materi presentasi, dan kemampuan presentasi dan penugasan materi. Kategori Perencanaan Progresif ditetapkan berdasarkan konsistensi naiknya nilai total seluruh parameter perencanaan selama tiga tahun terakhir dan nilai peningkatan total terbesar. Kategori Perencanaan Inovatif ditetapkan dengan kriteria inovasi kebijakan dan inovasi proses dan program</p>
2	Penghargaan Terbaik Katagori Badan Kepegawaian Daerah Ter-Inovatif se-Indonesia	Badan Kepegawian Negara (BKN) RI	Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih penghargaan tingkat nasional, yakni sebagai terbaik kategori Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terinovatif se-Indonesia. Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Regional (Kanreg) X Badan Kepegawian Negara (BKN), Made Ardita, diterima Sekda Kota Denpasar, AA Ngurah Rai Iswara, didampingi Asisten Pemerintahan Kota Denpasar, I Ketut Mister, di Kantor Walikota Denpasar

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Penghargaan Nirwasita Tantra Award, sebagai Nominator Seleksi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Kementerian Lingkungan Hidup RI	Penghargaan untuk komitmen pemerintah daerah yang secara cerdas dan tulus ikhlas mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membangun lingkungan hidup daerah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, baik gubernur, bupati/walikota yang telah berhasil merumuskan kebijakan-kebijakan dan menerapkannya untuk lingkungan hidup yang semakin baik
4	Penghargaan Tropi Adipura Kirana Kategori Kota Besar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Penghargaan yang tak terlepas dari pola kerja yang digulirkan Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara dan seluruh aparaturnya Pemkot Denpasar berkolaborasi lewat sistem pengelolaan kebersihan berbasis lingkungan dari tingkat banjar, desa, kecamatan hingga kota.
5	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),	BPK Perwakilan Bali	Opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah yang diraih Pemkot Denpasar tahun ini untuk keempat kalinya. karena empat kali berturut-turut mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2012 atas sampai Tahun Anggaran 2015. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Karenanya kedepan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan
8	Juara Satu Lomba Kadarkum Tingkat Nasional	Kementerian Hukum dan HAM RI	Kontingen dari Kota Denpasar yang mewakili dari Propinsi Bali dalam Lomba KADARKUM Tingkat Nasional 2016 kali ini berhasil menjadi pemenang dan membawa pulang Piala Menteri Hukum dan HAM.
9	Juara Satu Lomba Kelurahan Tingkat Nasional, yang diraih Kelurahan Penatih	Kementerian Dalam Negeri RI	Salah satu Kelurahan yang berada di Kota Denpasar berhasil memenangkan perlombaan antar Kelurahan Tingkat Nasional sebagai Juara I. Prestasi yang berhasil diraih Kelurahan Penatih mengungguli Kelurahan Rejowinangun, Jogjakarta dan Kelurahan Jatimurni, Bekasi.

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Indonesian Attractiveness Awards 2016, Kota Terbaik Katagori Perkoridor MP3EI Bali Nusra	PT. Tempo Inti Media Group dan Frontire Consulting Group	Tempo Media Group bersama dengan lembaga riset Frontliner Consulting Group melakukan pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia. Pengukuran tersebut meliputi investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik. "Riset dilakukan untuk melihat kinerja pemerintah daerah secara objektif
13	Penghargaan Tangguh Award	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Tangguh Award ini merupakan puncak ajang kompetensi lomba tingkat nasional yang bertema kebencanaan
14	Penghargaan Puskesmas Terbaik Tingkat Nasional (Puskesmas II Denpasar Barat)	Kementerian Kesehatan RI	
15	Penghargaan Best Of The Best kategori Natamukti Nindya dari International Council for Small Business (ICSB)	International Council for Small Business (ICSB)	Denpasar kembali berhasil meraih penghargaan tingkat nasional yakni Best Of The Best kategori Natamukti Nindya dari International Council for Small Business (ICSB). Penghargaan ini diberikan karena Denpasar berhasil mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan iklim investasi UMKM, mendukung daya saing produk lokal, serta menciptakan ekosistem yang baik bagi para UMKM di Kota Denpasar. Penghargaan ini diberikan langsung oleh President of ICSB Indonesia, Hermawan Kertajaya kepada Walikota Denpasar IB. Rai Mantra yang diwakili Sekda Kota Denpasar, A.A.Nourah Rai Iswara.
16	Predikat Golden Champion pada The 2 nd Indonesia Smart Nation Award (ISNA) Smart City Katagori Kota Besar	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kota Denpasar berhasil meraih predikat Golden Champion pada The 2nd Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) Smart City Kategori Kota Besar. Penghargaan ini di umumkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara didampingi Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Arifin Rudianto, di Hotel Bidakara Jakarta,

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4
17	Penghargaan Indonesia Peringkat 5 Besar Smart City Katagori Kota Besar Nasional	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kota Denpasar berhasil meraih predikat Golden Champion pada The 2nd Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) Smart City Kategori Kota Besar. Penghargaan ini diumumkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara didampingi Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Arifin Rudiyanto, di Hotel Bidakara Jakarta
18	Penghargaan Tertinggi Bidang Daya Saing Pariwisata	Kementerian Pariwisata RI	Denpasar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan Tertinggi bidang Daya Saing Pariwisata ini diserahkan pada Selasa (6/12) oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta yang diterima Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Wayan Gunawan
19	Penghargaan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	Ini merupakan penghargaan dengan penilaian dalam hal kinerja pelayanan publik melalui observasi yang dilakukan Ombudsman tentang kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan pokok penilaian bahwa setiap instansi berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai atribut standar pelayanan publik
20	Marketeers` Award 2016	Marketeers` Award dan Indonesia Marketing Accociation (IMA)	Penghargaan ini diberikan untuk para pejabat publik (Bapak Walikota Denpasar) yang selama setahun ini , secara disadari atau tidak, terlihat menonjol dalam menjalankan konsep pemasaran yang baik dan benar. Selain itu penghargaan ini juga diberikan untuk tumbuh kembangnya realitas baru, pemasaran baru, maupun konten baru, dari masyarakat Indonesia ke dunia luar.
21	Penghargaan Terbaik Daerah Se Indonesia dalam usaha Pencegahan Korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	KPK RI	Penghargaan ini diberikan karena KPK menilai Pemerintah Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan LHKPN. Penghargaan ini di serahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Laode Muhammad Syarif yang diterima langsung oleh Wakil Walikota Denpasar I.G.N. Jaya Negara, SE, di Mahligai Ballroom Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau.

NO	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, yang diraih oleh SD Negeri 5 Tonja Kecamatan Denpasar Utara, SD Negeri 10 Sumerta Kecamatan Denpasar Timur dan SMP Negeri 8 Denpasar	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia RI	Semua sekolah ini telah peduli terhadap lingkungan selain itu penghargaan ini diraih setelah memenuhi kriteria yang ditentukan. Diantaranya kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, partisipasi masyarakat dan pengolahan sarana prasarana yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu untuk masuk kriteria sekolah harus ada usaha kesehatan sekolah dan usaha kebersihannya.
23	Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tertinggi katagori "Mentor"	Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla	Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan penghargaan yang diraih merupakan bentuk partisipasi masyarakat Kota Denpasar terhadap pembangunan yang dilakukan. "Penghargaan ini sebagai tantangan kedepan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kebutuhan bagi pemberdayaan perempuan maupun pemenuhan akan hak-hak terhadap anak, seperti ruang kreatifitas dan fasilitas pendidikan terhadap anak," ujar Walikota Rai Mantra disela-sela menerima penghargaan. Disamping itu APE yang diterima kali ini menurut Walikota Rai Mantra jangan sebagai pemuas diri, namun mampu sebagai motivator untuk peningkatan kegiatan, kreatifitas dan fasilitas terhadap anak.



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 18 A TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO 23 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);



10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada Tanggal 10 Juli 2015





Pemerintah Kota Denpasar



Diundangkan di Denpasar
Pada Tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA DENPASAR

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 18A

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016



Pemerintah Kota Denpasar



Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18A Tahun 2015

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
1	Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	a.	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1)	Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan	Areal lahan pertanian yang dapat dipertahankan akibat alih fungsi lahan
				2)	Persentase Desa Pekraman yang memiliki awig tertulis	Awig tertulis hasil kesepakatan warga yang menjadi dasar (AD/ART) untuk menjalankan Desa Pekraman
				3)	Persentase LPD Sehat	Menggambarkan Likuiditas LPD (lembaga keuangan mikro milik Desa Pekraman)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
		b	Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	1)	Jumlah Konflik Sosial	Melihat peran Pecalang dan jagabaya dalam mencegah atau mengatasi pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan
		c	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1)	Persentase Sekaa kesenian yang aktif	Melihat hasil pembinaan terhadap Sekaa kesenian untuk menjaga keberlanjutannya
				2)	Presentase Sanggar Tari yang aktif	Melihat hasil pembinaan terhadap Sanggar tari untuk menjaga keberlanjutannya

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				3)	Persentase STT yang mengikuti Lomba Ogoh Ogoh Tradisional	Melihat peran generasi muda dalam berkreaitifitas berbahan dasar anyaman bambu dan kreasi gamelanr maupun tari
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	a.	Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran	1)	Angka kemiskinan	Melihat kinerja dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untu memenuhi kebutuhan dasarnya
				2)	Prevelansi gizi buruk pada balita	Menggambarkan hasil upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan gizi balita
				3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
		b.	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Riil	1)	Persentase usaha Mikro yang meningkat katagorinya menjadi Usaha Kecil	Menggambarka kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha mikro
				2)	Persentase Usaha Kecil yang meningkat katagorinya menjadi Usaha Menengah	Menggambarka kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha kecil
				3)	Persentase Koperasi Aktif	Menggambarka kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas koperasi
		c.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	1)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses hasil pembangunan untuk memeperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				2)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
		d	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1)	Persentase berkurangnya Kawasan Kumuh	Menggambarkan Likuiditas LPD (lembaga keuangan mikro milik Desa Pekraman)
		e	Meningkatnya Infrastruktur	1)	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan baik
				2)	Persentase berkurangnya Titik Genangan	Untuk Melihat keberhasilan dalam mengatasi titik genangan

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				3)	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Melihat capaian upaya menyadarkan masyarakat agar mau tersambung dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal maupun IPAL terpusat skala kota
				4)	Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Layanan PDAM	Melihat keberhasilan perluasan cakupan layanan PDAM
				5)	Jumlah Titik Kemacetan yang dapat diurai	Menggambarkan kondisi lalulintas pada ruas jalan utama
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)	a.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma	1)	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
		b.	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,	1)	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Menggambarkan Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
		demokratis, dan terpercaya	2) Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil
			3) Skore Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Menggambarkan Kinerja Urusan yang ditangani
			4) Indeks RB	Indeks untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi
			5) Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Penilaian dari Ombudsman terhadap pelayanan publik

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
		c.	Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas.	1)	Persentase pelayanan publik berbasis IT	Menggambarkan layanan publik yang lebih bermutu dan efisien, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam zaman global dan kompetitif ini.
		d.	Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan	1)	Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda	Menggambarkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	a.	Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1)	Indek Pembangunan Manusia	indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk) dikaitkan dengan pendapatan, kesehatan dan pendidikan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
		b	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	1)	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Melihat perkembangan kontribusi sektor Industri pengolahan dalam pembentukan PDRB
				2)	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Melihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB
		c	Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan	1)	Produktivitas padi	Melihat produksi padi yang dihasilkan per hektar
				2)	Produksi Perikanan	Melihat produksi ikan hasil budidaya maupun hasil tangkap
				3)	Konsumsi Ikan	tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun
				4)	Produksi Daging (Ton)	Menggambarkan kemampuan sub sektor peternakan dalam memproduksi daging

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				5)	Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kpt/Th)	tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun
		d	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan	1)	Angka usia harapan hidup (Thn)	Rata rata kesempatan hidup atau waktu hidup yang tersisa
				2)	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	Kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
			3) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup digunakan untuk melihat kinerja program kesehatan reproduksi
			4) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Menggambarkan kondisi penanganan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
		e	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	<p>1) Persentase penduduk usia >15 tahun melek huruf</p> <p>2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI</p> <p>3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs</p> <p>4) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA</p>	<p>Melihat kemampuan membaca dan menulis masyarakat</p> <p>Menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya</p> <p>Menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya</p> <p>Menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya</p>

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
			5) Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu
			6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu
			7) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu
			8) Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
			9) Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
			10) Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun	Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				11)	Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI	Menggambarkan tingkat keberhasilan proses pendidikan
				12)	Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs	Menggambarkan tingkat keberhasilan proses pendidikan
				13)	Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA	Menggambarkan tingkat keberhasilan proses pendidikan
		f	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	1)	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Menggambarkan perkembangan sektor pariwisata
				2)	Lama Tinggal Wisatawan	Menggambarkan tingkat kunjungan ke obyek daya tarik wisata
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia	a.	Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali.	1)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Luas Ruang Terbuka Hijau di bagi luas wilayah dikali 100 persen
				2)	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Taman	Survey Presepsi kepuasan masyarakat terhadap Taman yang ada

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
	dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	b. Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat	1) Persentase Desa/Kel yang mengelola sampah secara mandiri	Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
			2) Persentase usaha yang memenuhi bakumutu kualitas air	Untuk melihat tingkat pencemaran air akibat keberadaan dunia usaha
			3) Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Mandiri	Penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup
			4) Peningkatan Jumlah Sekolah Adiwiyata Nasional	Penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		PENJELASAN
1	2	3		4		5
				5)	Adipura	penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan
		c.	Meningkatkan Kerukunan Beragama	1)	indeks Kerukunan Umat Beragama	Survei yang mengukur tiga indikator utama, yaitu: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama

WALIKOTA DENPASAR

IB RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,

akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kota Denpasar menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kota Denpasar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.



Pemerintah Kota Denpasar



Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

WALIKOTA DENPASAR,
IB. RATDHARMAWIJAYA MANTRA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2016



Pemerintah Kota Denpasar

